

LAPORAN KINERJA

TW I TAHUN 2026

**SEKRETARIAT DPRD
KAB. LUWU TIMUR**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Sekretariat DPRD ini dapat disusun dengan baik dan tepat waktu. Sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Perjajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur menyusun Laporan Kinerja Tahun 2026.

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam mendukung kelancaran kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik dalam aspek administrasi, fasilitasi persidangan, maupun pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD. Selain itu, laporan ini juga disusun sebagai bagian dari implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi kinerja instansi pemerintah.

Dalam laporan ini disajikan capaian kinerja selama Triwulan I Tahun 2026, termasuk realisasi program dan kegiatan, penggunaan anggaran, serta berbagai permasalahan dan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pada periode selanjutnya.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi penyajian maupun substansi. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif demi penyempurnaan laporan di masa yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menggambarkan capaian kinerja Sekretariat DPRD terkait keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta upaya penyelesaiannya dari setiap kendala yang dihadapi pada Sekretariat DPRD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 maupun RPJMD Tahun 2025-2029.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan informasi yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan..

Malili, 14 April 2026
Sekretaris DPRD,



ALAMSYAH PERKESI, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP.197201142006041005

DAFTAR ISI

	<i>hal.</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Tugas dan Fungsi	1
1.2 Struktur Organisasi.....	2
1.3 Aspek Strategi Organisasi.....	5
1.4 Isu Strategis/Permasalahan	6
1.5 Sistematika Laporan.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Rencana Strategis	9
2.2 Rencana Kerja Tahunan	12
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	19
3.2 Analisis Capain Kinerja	20
BAB IV PENUTUP	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perwujudan Visi RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2025-2029	10
Tabel 2	Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD	14
Tabel 3	Program dan Keuangan.	15
Tabel 4	Skala nilai Penunjang Kinerja.....	19
Tabel 5	Capaian Kinerja Sasaran Stategis 1 Tahun 2026	20
Tabel 6	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran I indikator ke 1	23
Tabel 7	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 terhadap target jangka menengah.....	25
Tabel 8	Capaian indikator Persentase fasilitasi Pembahasan peraturan daerah yang di tetapkan menjadi perda dengan capaian kabupaten.....	26
Tabel 9	Capaian indikator Persentase fasilitasi penganggaran dan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD Thun 2026 dengan capaian kabupaten.....	27
Tabel 10	Capaian Kineja dan Anggaran Tahun 2026.....	31
Tabel 11	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	32
Tabel 12	Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2026	37
Tabel 13	Perbandingan Target Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya pada indikator ke 2	40
Tabel 14	Capaian kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah indikator ke 2	41
Tabel 15	Perbandingan Target dan realisasi Tahun 2026 dengan Tahun-Tahun sebelumnya	42
Tabel 16	Capaian Kinerja Tahun 2026 Terhadap Jangka Menengah	43
Tabel 17	Perbandingan Dengan Target Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota.....	44
Tabel 18	Capaian Kinerja dan Anggran Tahun 2026	45
Tabel 19	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	46
Tabel 20	Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung.....	47
Tabel 21	Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2026.....	52
Tabel 22	Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, kKegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026	53
Tabel 23	Permasalahan dan Solusi	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Sekretariat DPRD.....4

BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), setiap instansi pemerintah dituntut untuk mampu menyelenggarakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan administrasi dan fasilitasi terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, Visi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, Sekretariat DPRD menyusun Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 yang memuat capaian pelaksanaan program dan kegiatan, realisasi anggaran, serta berbagai kendala yang dihadapi selama periode pelaporan. Laporan ini juga menjadi sarana evaluasi internal guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi pada triwulan berikutnya.

Penyusunan laporan ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.1 TUGAS DAN FUNGSI

Sekretariat DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan peraturan tersebut, Sekretariat DPRD mempunyai Tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Tugas : membantu Bupati dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- Fungsi : a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;

- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

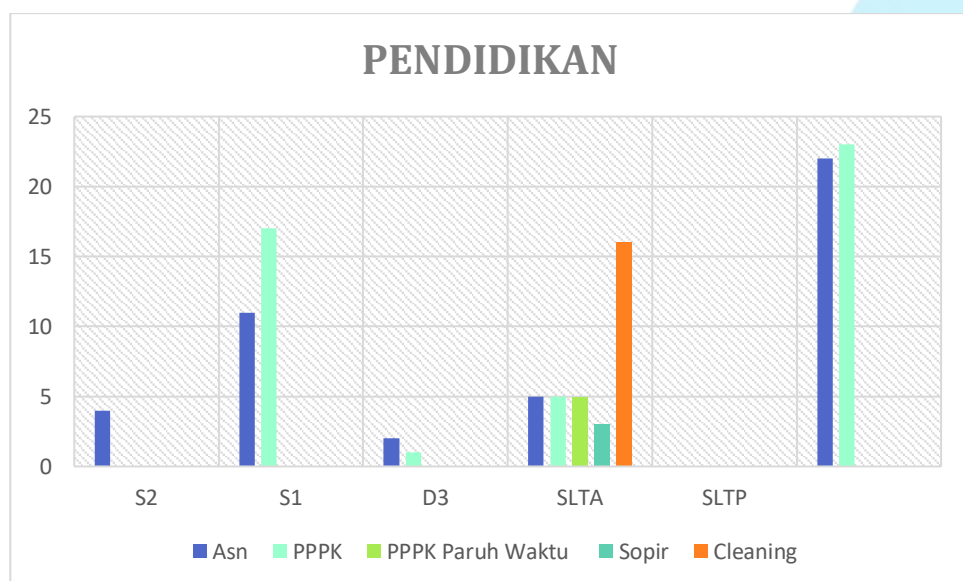
1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan unsur pelayanan administrasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD Kab Luwu Timur dibentuk melalui Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2021 .

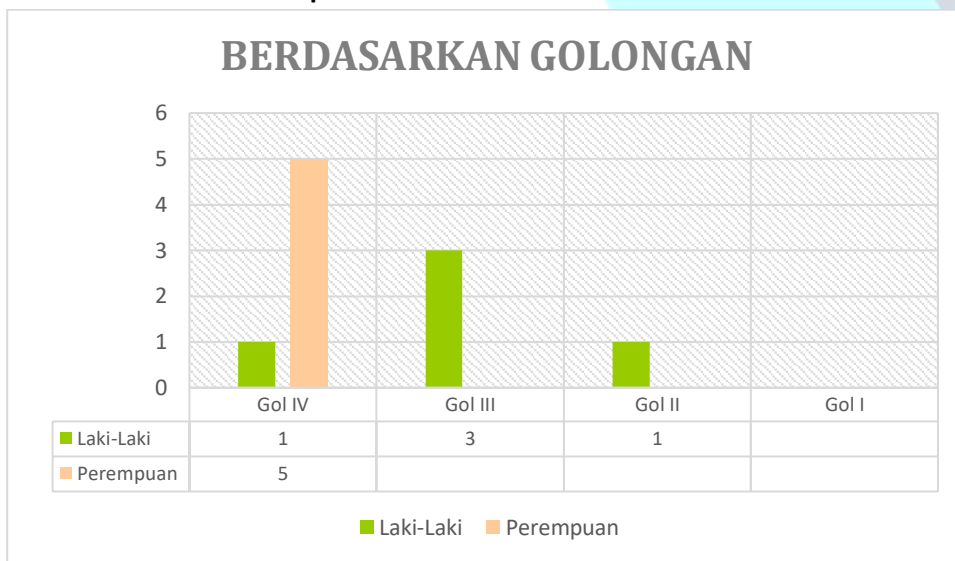
Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, berdasarkan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 65 orang, terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) 22 orang, PPPK 23 org dan PPPK Paruh Waktu 5 orang Cleaning Service 16 orang, Sopir 3 orang dan. Struktur tingkat pendidikan SDM Sekretariat DPRD Daerah Kabupaten Luwu Timur tercantum pada diagram berikut:

Grafik. 1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sekretariat DPRD
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026

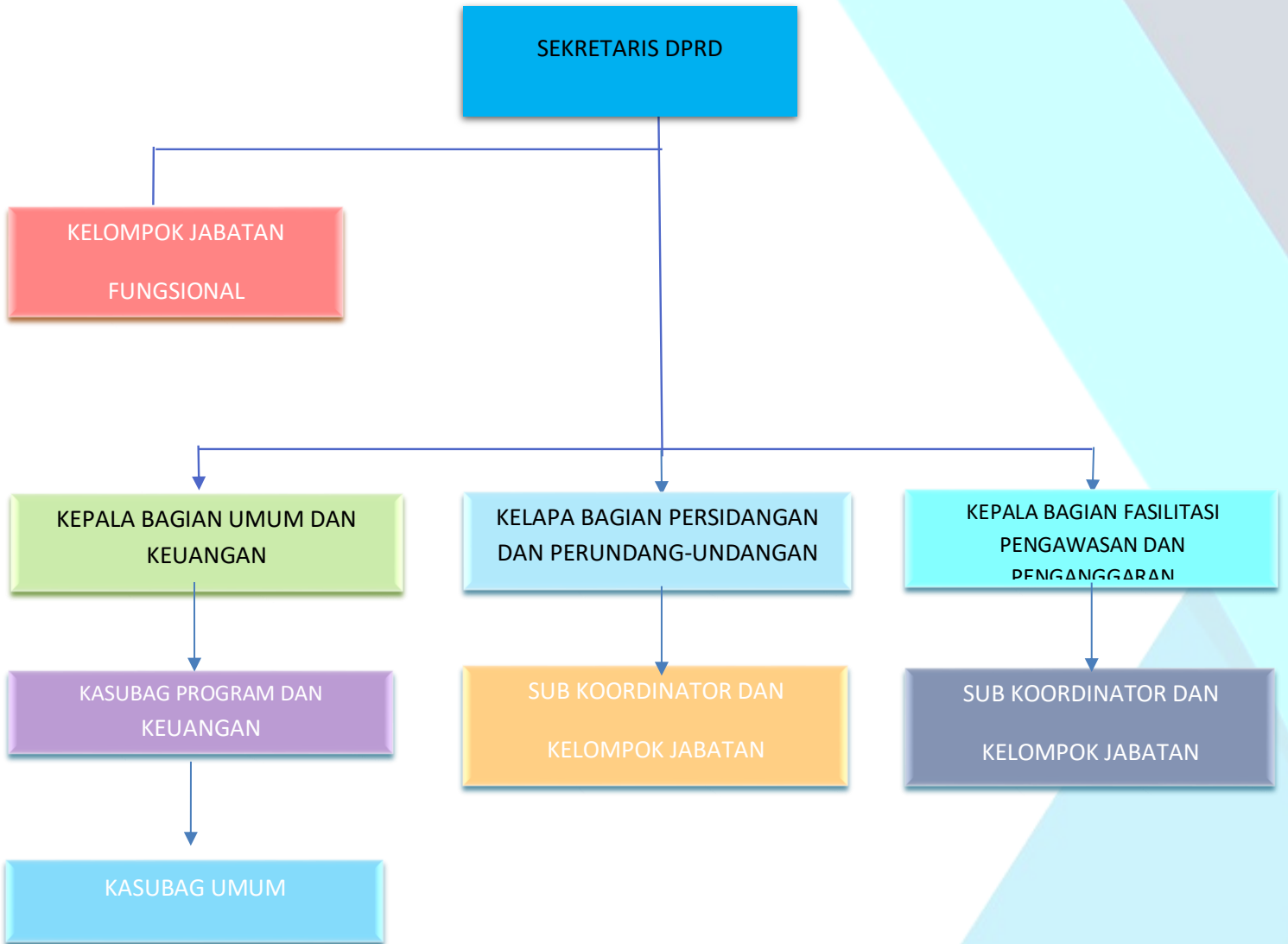


Grafik. 2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Sekretariat DPRD
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026



Gambar.1

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur merupakan kondisi, isu, dan tantangan utama yang memengaruhi kemampuan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelayanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas DPRD. Aspek strategis ini menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Sekretariat DPRD.

1. Peran Strategis Sekretariat DPRD sebagai Mitra DPRD,
Sekretariat DPRD memiliki peran strategis sebagai mitra kerja DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan. Kualitas fasilitasi yang diberikan secara langsung memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, sehingga diperlukan dukungan administrasi, substansi, dan teknis yang profesional dan responsif.
2. Dinamika Regulasi dan Kebijakan Pemerintah Daerah,
Perubahan dan penyesuaian regulasi di bidang pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan, serta peraturan perundang-undangan lainnya menuntut Sekretariat DPRD untuk senantiasa adaptif dan meningkatkan kapasitas aparatur agar pelaksanaan fasilitasi DPRD tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur,
Ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia aparatur menjadi aspek strategis dalam menjamin kualitas layanan Sekretariat DPRD. Diperlukan peningkatan kapasitas ASN melalui pendidikan, pelatihan, serta penguatan peran tenaga ahli guna mendukung DPRD dalam pengambilan keputusan yang berbasis data dan regulasi.
4. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang,
Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kerja, termasuk fasilitas persidangan, teknologi informasi, serta dukungan administrasi perkantoran, merupakan aspek strategis yang memengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas DPRD dan Sekretariat DPRD.
5. Tuntutan Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja,
Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pengelolaan keuangan yang akuntabel menuntut Sekretariat DPRD

untuk memperkuat perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja secara terintegrasi dan berkelanjutan.

6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Digitalisasi Layanan,
Perkembangan teknologi informasi menjadi peluang strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan Sekretariat DPRD melalui digitalisasi administrasi, dokumentasi persidangan, serta penyediaan data dan informasi yang cepat dan akurat bagi DPRD.
7. Koordinasi dan Sinergi dengan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan.

Pelaksanaan fungsi DPRD memerlukan koordinasi yang intensif dengan perangkat daerah, instansi vertikal, serta pemangku kepentingan lainnya. Sekretariat DPRD berperan strategis dalam memastikan terbangunnya sinergi dan komunikasi yang efektif guna mendukung kelancaran tugas DPRD.

1.4 ISU STRATEGIS/PERMASALHAN

Isu strategis Sekretariat DPRD merupakan permasalahan utama yang berdampak signifikan terhadap kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Isu strategis ini menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Sekretariat DPRD. Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur mendukung dan mewujudkan tercapainya sasaran strategis Daerah Kabupaten Luwu Timur yaitu "Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (S13)". Namun dalam pelaksanaan Sekretariat DPRD di Kabupaten Luwu Timur masih terdapat permasalahan antara lain :

1. Belum optimalnya SDM yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selain itu, kompetensi aparatur dalam mendukung tugas-tugas teknis DPRD, seperti Notulen rapat, masih perlu ditingkatkan.
2. Belum Optimalnya Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, serta pelaporan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD belum sepenuhnya terintegrasi dan berbasis hasil, sehingga berdampak pada efektivitas penerapan SAKIP dan penguatan akuntabilitas organisasi.

3. Realisasi Capaian kinerja pada Triwulan I belum sepenuhnya maksimal. Terdapat kendala dalam penyesuaian jadwal kegiatan dengan penyerapan anggaran, serta perlunya peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
4. Belum optimalnya pengukuran dan pelaporan kinerja secara berkala.

1.5 SISTEMATIKA LAPORAN

Bab. I - Pendahuluan

Memuat tentang gambaran umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama organisasi dan sistematika pelaporan dan sekilas pengantar lainnya.

Bab II - Perencanaan Kinerja

Memuat tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2026 yaitu Target Kinerja 2025-2029.

Bab III - Akuntabilitas Kinerja

Pada Sub bab ini disampaikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, analisis pencapaian kinerja sasaran dan analisis pencapaian kinerja keuangan. Untuk setiap pernyataan kinerja yang dimaksud sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Bab IV – Penutup

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2026, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya penyelesaiannya serta langkah, solusi dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan kinerja Sekretariat DPRD merupakan penjabaran dari perencanaan strategis yang memuat target kinerja yang ingin dicapai dalam periode tertentu, khususnya pada Triwulan I Tahun 2026. Perencanaan kinerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, terukur, dan akuntabel.

Sehubungan dengan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/37/AA.01/2025 Tanggal 14 November 2025 perihal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2026, yang menyebutkan "*bahwa apabila terdapat penyesuaian Perjanjian Kinerja dengan dasar RPJMD dan Renstra periode terbaru, maka Laporan Kinerja 2026 tetap harus memuat Analisa kinerja berdasarkan periode sebelum dan sesudah perubahan*". Sehubungan hal tersebut, pada perencanaan strategis disajikan sandingan antara RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 dan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029.

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, Visi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 adalah :

"Luwu Timur Maju dan Sejahtera"

Dalam rumusan visi ini terkandung kata kunci sebagai pokok visi yang saling terkait sebagai sebuah kesatuan cita-cita pembangunan, yakni "Berkelanjutan", "Lebih Maju", dan "Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya". Makna atau penjelasan dari setiap pokok visi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4. Perwujudan Visi RPJMD Kab Luwu Timur Tahun 2025-2029

Visi	Pokok Visi	Penjelasan Visi
"Luwu Timur Maju dan Sejahtera"	"Maju"	Kondisi dimana Luwu Timur mencapai kemajuan dalam ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola melalui peningkatan daya saing ekonomi, pembangunan wilayah yang merata, serta pemerintahan yang efektif dan berbasis digital. Ini ditandai dengan ekonomi yang tumbuh, konektivitas yang baik, pelayanan publik yang efektif dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
	"Sejahtera"	Kondisi dimana Luwu Timur mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi, serta pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Kondisi ini tercermin dari pemerataan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, penurunan tingkat kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bersifat inklusif, serta terjaganya kelestarian lingkungan hidup sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Sumber : Dokumen RPJMD Kab. Luwu Timur Tahun 2025-2029

Untuk bisa mewujudkan visi tersebut dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (Lima) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya yang berkualitas, berbudaya dan berdaya saing.
2. Meningkatkan daya saing ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
3. Mempercepat pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang merata dan berkeadilan.
4. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital.

Misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 yaitu :

Misi Ke-5 RPJMD : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital.

✚ Perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD tahun 2025-2029 mengacu pada Misi ke 5, tujuan dan sasaran yang ada pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, yaitu :

- Misi ke 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang melayani efektif, efisien dan bersih melalui Transformasi Digital
- Tujuan 6 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Adaptif (T6)
- Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berorientasi Pelayanan Publik

Dalam upaya mendukung capaian kinerja RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab menetapkan tujuan dan sasaran organisasi yaitu :

- Tujuan : Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD.
- Sasaran : Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur
- Indikator : a) Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda Target 75 %
b) Persentase fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD Target 100%
- Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berorientasi Pelayanan Publik
- Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (S2)
- Indikator : Nilai SAKIP.

Berdasarkan hasil pendampingan dari Menpan, dimana dalam menyusun kinerja mengacu pada PermenPAN-Rb Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Sekretariat DPRD melakukan revisi/perbaikan pada sasaran dan indikator sasaran. Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Sekretariat DPRD ada 2 (dua) yaitu :

1. Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur dengan Indikator Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda dan Persentase fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator Nilai SAKIP (hasil evaluasi internal Inspektorat).

Berikut ini adalah sasaran dan indikator sasaran Sekretariat DPRD sesuai dokumen Renstra periode Tahun 2025-2029 (sebelum dilakukan perubahan mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 89 Tahun 2021).

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja sasaran RENSTRA
Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur 2025-2030

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Base line 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
-1	-2	-3	-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10
1	Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD		Persentase Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	75	80	80	85	85	85	90
		Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur	Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda	75	75	80	85	85	85	90

			Persentase fasilitasi Penganggaran dan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD	100	100	100	100	100	100	100
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan berintegritas dan adaptif (T6)	Meningkatnya Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	BB	BB	BB	B	B	B	B
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,80%	75	75	80	80	85	85

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sekretariat DPRD telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2025 melalui Rencana Kerja (Renja) yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan mengacu pada Peraturan Daerah Luwu Timur Nomor 05 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025. Rencana kerja kemudian dijabarkan ke dalam Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor Tahun 2024.

Rencana kinerja yang direncanakan pada tahun 2025 merupakan suatu implementasi rencana jangka menengah ke dalam rencana kerja jangka pendek mencakup Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target Kinerja Sasaran Sekretariat DPRD Tahun 2025, yaitu :

1. Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda ; 75%
2. Persentase fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD : 100,00%
3. Nilai AKIP Perangkat Daerah : 75,00%

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran kegiatan dalam hal ini melalui pengukuran indikator kinerja kegiatan. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis, di tahun 2026 disusun perjanjian kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran kegiatan, kegiatan, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja yang ada dalam perjanjian menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran sesuai indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2026 yang merupakan kesanggupan untuk melaksanakan kinerja, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2026, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur	Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda	75%
		Persentase fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD	100%
2	Meningkatnya Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	75%

Penetapan kinerja dengan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Tahun 2026 didukung dengan pembiayaan APBD Kabupaten Luwu Timur sebesar **Rp. 51.549.625.755,-** (Lima Puluh Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), terdiri dari belanja pegawai Rp **26.113.048.235,-** belanja barang

dan jasa **Rp. 22.955.952.500,-** dan belanja modal **Rp 2.480.625.020,-**. Adapun program dan anggaran secara lengkap disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.
Program dan Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2026

No	Program	Anggaran (RP)	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	34.858.093.305	APBD
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	16.691.532.450	APBD
	JUMLAH	51.549.625.755	

Berikut ini penjelasan penetapan sasaran, indikator sasaran dan target yang ditetapkan Sekretariat DPRD Tahun 2026.

Tabel 4
Penjelasan atas Sasaran, Indikator Sasaran dan Target yang Ditetapkan (APBD)

NO	SASARAN 1	PENJELASAN
1	Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur	Sasaran ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kinerja Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD Kabupaten Luwu Timur. Kedua fungsi tersebut merupakan bagian penting dari tugas DPRD dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

		<p>· Dalam fungsi penganggaran, DPRD memiliki peran dalam membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama pemerintah daerah. Sekretariat DPRD berperan dalam : Menyediakan dukungan administrasi dan teknis dalam proses pembahasan anggaran, Menyiapkan bahan rapat, dokumen pendukung, serta data yang akurat dan tepat waktu, dan Memfasilitasi rapat-rapat badan anggaran dan alat kelengkapan DPRD lainnya. Dalam fungsi pengawasan, DPRD bertugas mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan kebijakan pemerintah daerah. Peran Sekretariat DPRD meliputi : Memfasilitasi kegiatan pengawasan seperti rapat kerja, kunjungan lapangan, dan rapat dengar pendapat., Menyusun dan menyediakan laporan hasil pengawasan secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik dan Mendukung ketersediaan data dan informasi yang relevan sebagai bahan pengawasan DPRD.</p>
NO.	INDIKATOR KINERJA 1	PENJELASAN
1	Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda	<p>· Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Fasilitasi yang dimaksud mencakup dukungan administratif, teknis, dan koordinatif dalam seluruh tahapan pembahasan bersama DPRD dan pemerintah daerah. Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda adalah perbandingan antara jumlah Ranperda yang berhasil difasilitasi hingga ditetapkan menjadi Perda dengan jumlah total Ranperda yang dibahas dalam periode tertentu.</p>
NO.	TARGET 1	PENJELASAN
1	75	<p>Target Persentase Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda meningkat dari tahun sebelumnya. Target Tahun 2025 capaian Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda 69,23% atau 13 ranperda yang diusulkan hanya 9 Ranperda yang ditetapkan menjadi perda dan 4 ranperda yang lanjut akan dibahas di tahun 2026. Berdasarkan kondisi tersebut, pada Tahun 2026 peningkatan persentase capaian dibandingkan tahun sebelumnya.</p>
NO.	INDIKATOR KINERJA 2	PENJELASAN
2	Persentase fasilitasi Penganggaran dan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD	<p>Persentase fasilitasi penganggaran dan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD adalah perbandingan antara jumlah kegiatan penganggaran dan pengawasan DPRD yang berhasil difasilitasi dengan jumlah seluruh kegiatan yang direncanakan dalam periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Fasilitasi tersebut mencakup dukungan administratif, teknis, serta koordinasi dalam setiap tahapan kegiatan yang berkaitan dengan pembahasan, pelaksanaan, dan pengawasan APBD</p>

	TARGET 2	PENJELASAN
2.	100%	Target sebesar 100% berarti seluruh kegiatan penganggaran dan pengawasan DPRD yang telah direncanakan pada Tahun 2025 diharapkan dapat difasilitasi sepenuhnya oleh Sekretariat DPRD pada Tahun 2026. Penetapan target 100% didasarkan pada beberapa pertimbangan: Kegiatan penganggaran dan pengawasan merupakan kegiatan rutin dan wajib yang harus dilaksanakan oleh DPRD, kegiatan telah disusun secara realistis dan terjadwal, sehingga seluruhnya dapat difasilitasi.
NO	SASARAN 2	PENJELASAN
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	<p>Sakip adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan kinerja dan pengukuran pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.</p> <p>Implementasi SAKIP merupakan bagian dari transformasi cara dan budaya kerja melalui penerapan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja</p>
NO.	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Inspektorat merupakan salah satu Tim Sakip Kabupaten, dimana hasil penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang di sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Lakip (LHE Lakip) merupakan bentuk evaluasi atas penilaian akuntabilitas pada OPD
NO.	TARGET	PENJELASAN
1.	75	Target yang ditetapkan Sekretariat DPRD adalah 6=75 sebagai komitmen mendukung target Kabupaten, maka pada tahun 2026 Sekretariat DPRD meningkatkan target capaian.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja TW I dikatakan mampu mengkomunikasikan capaian kinerja unit kerja secara jujur, objektif, akurat dan transparan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, apabila dalam penyajiannya memenuhi prinsip-prinsip dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur selaku pengembal amanah, melaksanakan kewajiban berauntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Tahun 2026 Kabupaten Luwu Timur yang dibuat sesuai ketentuan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239 tahun 2003.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang amat penting bagi suatu organisasi, pengukuran kinerja menurut Lynch dan Cross (1993) dalam Sony Yuwono dkk (2006:29) bermanfaat untuk:

- a. Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa Instansi lebih dekat pada pelanggannya dan membuat seluruh orang dalam organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada pelanggan.
- b. Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata rantai pelanggan dan pemasok internal.

- c. Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut.
- d. Membuat suatu tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi.
- e. Membangun konsensus untuk melakukan suatu perubahan dengan memberi "reward" atas perilaku yang diharapkan tersebut.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

a. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2026 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2026 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan Bupati Luwu Timur. Tingkat akuntabilitas kinerja instansi diukur dari setiap komponen yang ada dengan kategori sebagai berikut :

Tabel 4
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90	Sangat memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	>70-80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4.	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban
6.	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tak perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar

7.	D	0-30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu perbaikan yang sangat mendasar
----	---	------	--

Dalam penyusunan laporan kinerja diperlukan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja diterapkan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Terdapat beberapa tahapan didalam melakukan pengukuran kinerja dimana tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data primer maupun sekunder. Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Pengukuran target kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan pada Sekretariat DPRD dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan sasaran strategis pada Sekretariat DPRD yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang berdasarkan Tahun 2021-2026 (PK Awal) dan PK Perubahan Perjanjian Kinerja yang berdasarkan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 (PK Perubahan).

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS I

“Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur”

Pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur yang dicerminkan dalam pencapaian indikator kinerja. Adapun capaian kinerja secara rinci untuk setiap indikator kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5
Capaian Kinerja Sasaran 1 Strategis
Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur
Tahun 2026

No	Sasaran Startegis I	Indikator Kinerja	Target Renstra 2026 (2025-2029)	Target Renstra 2026 (2025-2029)	Realisasi TW 1 2026
1	Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur	Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda	75%	75%	0%
		Persentase fasilitasi Penganggaran dan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD	100%	100%	0%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja TW I Tahun 2026, perbandingan antara target dan realisasi kinerja menunjukkan bahwa sebagian besar indikator pada sasaran strategis Sekretariat DPRD telah mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis secara umum telah berjalan efektif.

✚ Pada sasaran strategis **Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur,**

1. **Indikator 1** Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda, ditargetkan sebesar **75%** dalam Renstra Tahun 2025–2029 dan realisasi sebesar **0%** .

Capaian kinerja pada indikator ini belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

Dari 7 Ranperda yang ditargetkan pada Triwulan I, sebanyak 4 Ranperda telah memasuki proses pembahasan adanya 3 Ranperda yang belum memenuhi kelengkapan administrasi pendukung sehingga belum dapat disampaikan ke DPRD untuk dilakukan proses pembahasan (Informasi dari Bagian Hukum).

Adapun rumus formulasinya adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Ranperda yang difasilitasi dan ditetapkan menjadi Perda}}{\text{Jumlah Ranperda yang dijadwalkan untuk dibahas}} \times 100$$

Dari 7 Ranperda yang ditargetkan pada Triwulan I, sebanyak 4 Ranperda telah memasuki proses pembahasan, yaitu:

- ✚ Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman (RP3KP) Tahun 2025–2045.
- ✚ Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.
- ✚ Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- ✚ Ranperda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Sementara itu, 3 Ranperda lainnya belum dapat disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan karena belum memenuhi kelengkapan administrasi pendukung sebagaimana informasi dari Bagian Hukum, yaitu:

- ✚ Ranperda tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal.
- ✚ Ranperda tentang Penyertaan Modal kepada Perumdam Waemami.
- ✚ Ranperda tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Kondisi tersebut menyebabkan realisasi fasilitasi pembahasan Ranperda yang ditetapkan menjadi Perda pada Triwulan I baru belum ada masih dalam proses pembahasan.

2. **Indikator 2** Persentase fasilitasi Penganggaran dan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD memiliki target 0 % TW I tahun 2026 realisasi belum ada.

Penetapan target sebesar 0% pada Triwulan I disebabkan karena siklus kegiatan penganggaran dan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD belum memasuki tahapan pelaksanaan pada periode ini. Kegiatan fasilitasi penganggaran umumnya dilaksanakan pada tahapan pembahasan perubahan APBD maupun penyusunan APBD tahun berikutnya, sedangkan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD biasanya lebih optimal dilakukan pada triwulan berikutnya setelah pelaksanaan anggaran berjalan. Dengan demikian, belum adanya realisasi pada Triwulan I bukan menunjukkan kinerja yang rendah, melainkan karena kegiatan tersebut **belum menjadi agenda yang dilaksanakan pada periode ini (bersifat time schedule).**

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2026 dan beberapa tahun terakhir (5 Tahun berturut-turut 2021 -2025)

Peningkatan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dilakukan dengan melihat dan membandingkan pencapaian indikator sasaran pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Adapun capaian Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda selama 5 (lima) tahun berturut-turut (2025 – 2029) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 6

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran I						
Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur						
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2025			Tahun 2026		
	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I	Target	Realisasi TW I	Capaian TW I

Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda	25%	20%	100%	25%	0%	0%
Persentase fasilitasi Penganggaran dan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Berdasarkan tabel diatas Pada Triwulan I Tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar **25%** dengan realisasi sebesar **20%** atau capaian kinerja sebesar 80%. Dari 4 Ranperda yang direncanakan untuk dibahas pada Triwulan I Tahun 2025, hanya 1 Ranperda yang dapat direalisasikan. Sementara itu, 3 Ranperda lainnya belum dapat direalisasikan karena belum adanya surat masuk dari pihak eksekutif melalui Bagian Hukum terkait penyampaian Ranperda sesuai jadwal dalam SK Propemperda Tahun 2025. Sedangkan pada Triwulan I Tahun 2026, target kinerja tetap sebesar 25%, namun realisasi sampai dengan akhir Triwulan I masih sebesar 0% sehingga capaian kinerja menjadi 0%. Meskipun demikian, secara substansi terdapat perkembangan dibandingkan tahun sebelumnya, karena dari 7 Ranperda yang ditargetkan pada Triwulan I Tahun 2026, sebanyak 4 Ranperda telah memasuki proses pembahasan. Adapun 3 Ranperda lainnya belum dapat disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan karena belum memenuhi kelengkapan administrasi pendukung sebagaimana informasi dari Bagian Hukum. Jika dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2025, penurunan realisasi pada Tahun 2026 terutama disebabkan oleh belum terpenuhinya persyaratan administrasi dan belum selesainya proses penyampaian Ranperda dari pihak eksekutif, sehingga pembahasan secara formal belum dapat dilaksanakan dan belum dapat dihitung sebagai realisasi kinerja. Namun demikian, adanya 4 Ranperda yang telah memasuki tahapan pembahasan menunjukkan bahwa proses persiapan pada Tahun 2026 relatif lebih maju dibandingkan Tahun 2025, sehingga berpotensi meningkatkan realisasi pada triwulan berikutnya apabila kelengkapan administrasi segera dipenuhi.

Sedangkan Indikator 2 Persentase fasilitasi Penganggaran dan pengawasan

DPRD terhadap pelaksanaan APBD memiliki target 0 % TW I tahun 2026 realisasi belum ada. karena kegiatan tersebut **belum menjadi agenda yang dilaksanakan pada periode ini (bersifat time schedule).**

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai dengan Target Jangka Menengah

Adapun perbandingan antara target dan capaian pada tahun 2026 dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 7
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026
Terhadap Target Jangka Menengah (2025-2029)

Sasaran I	Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur		Target Akhir Renstra 2029	% Capaian s/d 2026 terhadap target akhir Renstra 2029
	Realisasi			
Indikator Kinerja Sasaran	Target TW I Tahun 2026	Realisasi sampai dengan Tahun 2026		
Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda	25	0	0%	0%
Persentase fasilitasi Penganggaran dan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD	0%	0%	0%	0%

Berdasarkan realisasi sampai dengan Tahun 2026 jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sampai dengan tahun 2026, walaupun belum berhasil namun masih dalam proses Fasilitasi dan proses penjadwan sesuai **schedule**.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian kinerja sampai dengan tahun ini menunjukkan bahwa secara kumulatif pelaksanaan fasilitasi pembahasan Ranperda telah berjalan sesuai arah kebijakan yang ditetapkan dalam

Renstra, namun masih diperlukan optimalisasi agar pada akhir periode perencanaan target jangka menengah dapat tercapai secara maksimal.

4. Perbandingan Dengan Target Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

- ✚ **Analisis perbandingan indikator 1** Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda di Kabupaten Luwu Timur tahun 2026 dengan target nasional, target Provinsi Sulawesi Selatan, dan capaian kabupaten/kota lain yang relevan.

Tabel 8
Capaian Indikator Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda Tahun 2026
(dibandingkan capaian Kabupaten)

Wilayah	Persentase Ranperda	Keterangan
Target Nasional	≥ 85%	target yang ditetapkan melalui RPJMN adalah minimal 85% Ranperda prioritas dapat difasilitasi hingga ditetapkan menjadi Perda . Di tingkat provinsi, target yang ditetapkan berkisar 75–85% , sementara di tingkat kabupaten/kota umumnya berada pada kisaran 70–80% sesuai dengan kapasitas sumber daya dan kompleksitas regulasi di
Provinsi Sulawesi Selatan	75–85%	Target disesuaikan dengan kapasitas daerah. Pemerintah Provinsi melalui Biro Hukum berperan sebagai fasilitator harmonisasi dan evaluasi Ranperda kabupaten/kota
Kabupaten/Kota	70–80%	Target realistis sesuai kemampuan SDM dan kompleksitas Ranperda di daerah. Variasi capaian antar

daerah cukup tinggi, tergantung jumlah Ranperda dalam Prolegda.

Pada tingkat nasional, pengukuran kinerja pembentukan Perda pada umumnya difokuskan pada ketepatan waktu penyusunan Propemperda, harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta jumlah Ranperda yang berhasil ditetapkan menjadi Perda sesuai rencana. Penekanan pada kualitas regulasi dan kesesuaian dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi menjadi perhatian utama.

Pada tingkat provinsi, indikator yang digunakan relatif selaras, yaitu mengukur persentase Ranperda yang dapat diselesaikan dan ditetapkan menjadi Perda dibandingkan dengan yang direncanakan dalam Propemperda. Capaian sangat dipengaruhi oleh kesiapan naskah akademik, hasil fasilitasi Gubernur, serta proses evaluasi dan klarifikasi.

Sementara itu, pada tingkat Kabupaten/Kota, termasuk pada tahun berjalan, realisasi indikator menunjukkan capaian sebesar **0%**, yaitu dari 7 Ranperda yang ditargetkan pada Triwulan I Tahun 2026, sebanyak 4 Ranperda telah memasuki proses pembahasan. Adapun 3 Ranperda lainnya belum dapat disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan karena belum memenuhi kelengkapan administrasi pendukung sebagaimana informasi dari Bagian Hukum.

✚ **Analisis perbandingan capaian indikator 2** Persentase fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD di Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 dengan target nasional, target Provinsi Sulawesi Selatan, dan capaian kabupaten/kota lain yang relevan.

Tabel 9
Capaian Indikator Persentase fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2026
(dibandingkan capaian Kabupaten)

Wilayah	Persentase Penganggaran dan Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD	Keterangan
Target Nasional	100%	

		Menargetkan capaian penuh sebesar 100% karena seluruh fungsi fasilitasi penganggaran dan pengawasan DPRD direncanakan selesai dalam satu tahun anggaran.
Provinsi Sulawesi Selatan	100%	Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulawesi Selatan menargetkan seluruh agenda pembahasan dan pengawasan APBD dapat difasilitasi 100%, mulai dari pembahasan KUA-PPAS, RAPBD, hingga monitoring pelaksanaan program. Pembahasan APBD 2026 di DPRD Sulsel telah berjalan sesuai tahapan dan selesai tepat waktu.
Kabupaten/Kota	100%	Dari target 100%, realisasi/capaian twi 0% karena sebagian kegiatan fasilitasi penganggaran dan pengawasan DPRD belum terlaksana pada Triwulan I, seperti rapat pembahasan, monitoring lapangan, dan evaluasi pelaksanaan APBD yang akan di jadwal .

5. Analisis Penyebab keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan

☞ Indikator 1 Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda.

➤ Analisis Penyebab keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran

1. Tersedianya rancangan peraturan daerah (Ranperda) dari pihak eksekutif maupun inisiatif DPRD sesuai jadwal.
2. Adanya koordinasi yang baik antara Sekretariat DPRD, DPRD, dan perangkat daerah pengusul.
3. Jadwal rapat pembahasan Ranperda dapat dilaksanakan tepat waktu tanpa penundaan.
4. Kelengkapan dokumen pendukung, seperti naskah akademik, draft Ranperda, dan bahan harmonisasi, telah tersedia sejak awal.
5. Tingginya komitmen anggota DPRD dan tim pembahas dalam menyelesaikan proses pembahasan hingga penetapan.

➤ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian indikator Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

1. Belum adanya surat masuk atau usulan Ranperda dari pihak eksekutif sehingga pembahasan belum dapat dilaksanakan.
2. Dokumen pendukung Ranperda belum lengkap, seperti naskah akademik, hasil harmonisasi, atau draft final.
3. Terjadinya penundaan jadwal rapat pembahasan karena kesibukan anggota DPRD atau perangkat daerah terkait.
4. Kurangnya koordinasi antara pihak pengusul dengan Sekretariat DPRD dalam penyusunan agenda pembahasan.

➤ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa solusi yaitu :

1. Melakukan koordinasi intensif dan komunikasi aktif dengan bagian hukum atau perangkat daerah pengusul agar Ranperda segera disampaikan.
2. Menyusun jadwal pembahasan Ranperda lebih awal dan menetapkan target waktu penyelesaian setiap tahapan.
3. Melakukan monitoring berkala terhadap progres Ranperda yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

✚ **Beberapa bentuk efisiensi sumber daya yang telah/ dapat dilakukan antara lain:**

1. Pembagian tugas yang proporsional sesuai kompetensi pegawai.
2. Pengurangan penundaan administrasi melalui sistem kerja yang lebih terstruktur
3. Pemanfaatan maksimal fasilitas ruang rapat dan peralatan yang tersedia.
4. Pemeliharaan aset secara berkala untuk memperpanjang masa pakai.
5. Menyesuaikan alokasi tenaga dan waktu dengan tingkat urgensi kegiatan

👉 **Indikator 2 Persentase fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pengawasan DPRD**

➤ **Analisis Penyebab keberhasilan dalam pencapaian indikator 2**

1. Seluruh agenda fasilitasi penganggaran dan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD dapat dilaksanakan sesuai jadwal.

2. Tersedianya dokumen pendukung secara lengkap dan tepat waktu, seperti KUA-PPAS, RKA, DPA, laporan realisasi anggaran, dan bahan rapat.
3. Dukungan administrasi, sarana rapat, notulen, dan tindak lanjut hasil rapat dapat disiapkan secara optimal.
4. Adanya monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan APBD sehingga kegiatan pengawasan dapat terlaksana lebih efektif.

➤ **Hambatan/Kendala**

1. Keterlambatan penyampaian dokumen penganggaran dan laporan pelaksanaan APBD dari perangkat daerah.
2. Sebagian agenda rapat penganggaran atau pengawasan DPRD tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal.
3. Rendahnya tingkat kehadiran anggota DPRD atau perangkat daerah dalam rapat pembahasan.
4. Kurangnya koordinasi antar pihak terkait sehingga jadwal pembahasan dan pengawasan sering berubah.
5. Keterbatasan waktu pada triwulan berjalan sehingga belum seluruh kegiatan fasilitasi dapat direalisasikan.

➤ **Solusi**

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi intensif dengan perangkat daerah agar dokumen penganggaran dan laporan pelaksanaan APBD disampaikan tepat waktu.
2. Menyusun dan menetapkan jadwal rapat penganggaran dan pengawasan DPRD sejak awal tahun serta melakukan penyesuaian bila terjadi perubahan.
3. Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan agenda fasilitasi penganggaran dan pengawasan agar hambatan dapat segera diatasi.

✓ **Efektivitas Pelaksanaan Program Sekretariat DPRD dalam menunjang Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran OPD.**

Pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD pada triwulan I Tahun 2026 seefektif dan berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran OPD.

Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi

Perda dan Persentase fasilitasi penganggaran dan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD belum menunjukkan peningkatan.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

➤ Efisiensi Anggaran

1. Serapan anggaran yang tepat sasaran pada kegiatan yang benar-benar mendukung proses pembahasan Ranperda akan meningkatkan efisiensi.
2. Efisiensi anggaran dapat tercapai apabila pembahasan beberapa Ranperda dilaksanakan dalam satu rangkaian rapat atau jadwal terpadu sehingga mengurangi biaya perjalanan dinas, konsumsi, dan operasional

➤ Efisiensi Sumber Daya

1. ASN Sekretariat DPRD secara optimal sesuai tugas masing-masing membantu mempercepat proses administrasi dan fasilitasi pembahasan Ranperda.
2. Pembagian tugas yang jelas antara staf administrasi, bagian hukum, dan tim fasilitasi mencegah terjadinya duplikasi pekerjaan.

➤ Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel. 10
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target TW I	Realisasi	Capaian	Alokasi s.d TW	Realisasi s.d	Capaian
Strategis	Kinerja	2026	2026	(%)	2026	2026	(%)
Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur	Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda	25	0	0	1.672.226.100	367.574.896	21,98

	Persentase fasilitasi penganggaran dan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD	25	0	0	839.652.250	0	0
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase penetapan ranperda Tahun N	25%	16%	65%	6.788.211.550	921.785.663	13,58
	Persentase Ketetapan Penentuan Perda APBD Tahun N	25%	23%	92%	9.903.310.900	1.899.802.338	19,18

Tabel 11
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang Ditetapkan menjadi Perda	0%	21,98%	0
	Persentase fasilitasi penganggaran dan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD	0%	0%	0%

1. Pencapaian sasaran strategis **Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur** dengan indikator Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang Ditetapkan menjadi Perda sebesar 0% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar

21,98%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 0%. Adapun persentase efisiensi biaya dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

Persentase efisiensi biaya = $100\% - (\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%)$

$$\begin{aligned} &= 100\% - \left(\frac{367.574.896}{1.672.226.100} \times 100\% \right) \\ &= 100\% - 21,98 \\ &= \mathbf{78,02} \end{aligned}$$

2. Pencapaian sasaran strategis **Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur** dengan indikator Persentase fasilitasi penganggaran dan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD sebesar **0%** dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 0%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah **0%**. Karena dilaksanakan di triwulan III tahun 2026.

7. Analisis Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja sasaran

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD merupakan Program utama yang bertujuan untuk memfasilitasi kelancaran pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD secara optimal, efektif, dan akuntabel.

Program ini diarahkan untuk memberikan dukungan administratif, teknis, dan substantif kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam menjalankan tugas kelembagaan. Dukungan tersebut meliputi penyediaan layanan persidangan dan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD, fasilitasi pembahasan Ranperda, fasilitasi pembahasan APBD dan Perubahannya, pelaksanaan reses, rapat dengar pendapat (RDP), konsultasi dan koordinasi, serta dukungan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD.

❖ Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

indicator I yaitu Persentase penetapan ranperda Tahun N :

$$\frac{\text{Jumlah Ranperda yang ditetapkan menjadi Perda pada Tahun N}}{\text{Jumlah seluruh ranperda yang di rencanakan pada tahun N}} \times 100\%$$

- Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Penyelenggaraan

Kajian Perundang-Undangan dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan, yaitu :

1. Sub kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah indicator Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah target 7 ranperda terealisasi 0 dengan anggaran sebesar Rp1.308.964.250,- terealisasi Rp346.296.896,- atau sebesar 26,46%.
 2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan indicator Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan target 7 ranperda terealisasi 0, dengan anggaran sebesar Rp363.261.850,- dan terealisasi Rp 21.278.000,- atau sebesar 5,86%
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD dilaksanakan melalui 4 sub kegiatan, yaitu :
1. Sub kegiatan Pendalaman Tugas DPRD indicator Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD target 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%. dengan anggaran sebesar Rp1.295.960.750,- terealisasi Rp 168.211.460,- atau sebesar 12,97%.
 2. Sub kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli indicator Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli target 1 orang dan terelalisasi 1 orang atau 100%. Dengan Anggaran Rp120.802.000,- dan realisasi Rp102.11.460 atau 8,79%
 3. Sub kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi indicator Jumlah Tenaga Ahli Fraksi target 5 orang dan realisasi 5 orang atau 100%. Dengan anggaran sebesar Rp210.000.000,- realisasi Rp35.000.000,- atau 16,67%;
 4. Sub kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD indicator Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD target 1 dokumen dan realisasi 0. Dilaksanakan di TW III.
- Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah dilaksanakan melalui 1 sub kegiatan, yaitu :
1. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi indicator Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun. Target 35 Dokumen dan realisasi 0%. Dengan anggaran sebesar Rp 1.710.728.500,- realisasi Rp 4.500.000,-atau 0,27%
- Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan, yaitu :

1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD indicator Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD. Target 27 terealisasi 27 atau 100%. Dengan anggaran sebesar Rp 1.738.349.350,- realisasi Rp 332.157.907,- atau 19,10%atau
2. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah indicator Jumlah Dokumen Hasil FasilitasiPelaksanaan Tugas Badan Musyawarah. Target 3 laporan dan terealisasi 3 laporan atau 100%. Dengan anggaran sebesar RP 36.764.500,- realiasasi Rp 3.721.400,- atau 10,12%.

❖ **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**

indicator 2 yaitu **Ketetapan Penentuan Perda APBD Tahun N**

- Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran dilaksanakan melalui 5 sub kegiatan, yaitu :
1. Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS. Target 1 dokumen realisasi 0 dokumen. Dengan anggaran sebesar Rp 61.842.350,- KSub kegiatan ini dilaksanakan di TW III.
 2. Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS indicator Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS target 1 dokumen dan realisasi 0 dokumen . dengan anggaran sebesar Rp64.252.450,- realisasi masih 0. Sub kegiatan ini dilaksanakan di TW III.
 3. Sub Kegiatan Pembahasan APBD indicator Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD target 1 dokumen dan realisasi 0. Dengan anggaran sebesar Rp236.676.750, belum terealisasi dikarenakan sub kegiatan ini dilaksanakan pada TW IV.

4. Sub kegiatan Pembahasan APBD Perubahan indicator Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan target 1 dokumen realisasi 0 dokumen. Dengan anggaran sebesar Rp237.340.100 dan realisasi Rp 0. Kegiatan ini dilaksanakan di TW IV.
 5. Sub kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD indicator Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD target 1 dokumen dan terealisasi 0 dokumen. Dengan anggaran sebesar Rp 239.540.600,- Realisasi 0. Kegiatan ini dilaksanakan di TW III.
- Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dilaksanakan melalui 5 sub kegiatan, yaitu :
1. Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum indicator Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum target TW I laporan dan terealisasi 1 laporan atau 100%. Dengan anggaran sebesar Rp1.793.323.200,- realisasi Rp390.381.292,- atau 21,77%.
 2. Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur indicator Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur target 1 dokumen dan terialisasi 1 dokumen atau 100%. Dengan anggaran Rp1.795.663.800, realisasi Rp540.726.352,- atau 30,11.
 3. Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian indicator Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian target 1 laporan realisasi 1 laporan. Dengan anggaran sebesar Rp1.656.070.300,- realisasi Rp452.179.292,- atau 27,30.
 4. Sub kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan indicator Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan target 1 dokumen realisasi 0 dokumen. Dengan Anggaran sebesar Rp244.366.900,- realisasi 0. Kegiatan ini dilaksankana di TW II.
 5. Sub kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah indicator Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah target 1 dokumen dan realisasi 0. Dengan Anggaran sebesar Rp250.474.100,- realisasi belum ada dilaksanakan di TW II.

- Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dilaksanakan 2 sub kegiatan yaitu :
 1. Sub kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD indicator Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun target 3 laporan realisasi 0. Dengan anggaran Rp30.027.150,- realisasi Rp13.730.402,-
 2. Sub kegiatan Pelaksanaan Reses indicator Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses target 35 dokumen realisasi 35 dokumen atau 100%. Dengan anggaran sebesar Rp3.258.004.200,- dan realisasi Rp502.785.000,- atau 15.43

Adapun capaian kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 12
Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2026

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun 2026	Realisasi Tahun 2026	Capaian (%)
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase penetapan ranperda Tahun N	90%	75,59%	83,92%
I.						
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terselenggaranya Pembahasan Ranperda yang di fasilitasi sesuai Jadwal yang direncanakan	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%	0,00%	0,00%
a.	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	13 Dokumen	0	0.00%
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	13 Dokumen	0	
II.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas pembahasan penganggaran dan pengawasan	Ketetapan Penentuan Perda APBD Tahun N	100%	0%	0%
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya pembahasan dokumen kebijakan anggaran	Persentase dokumen kebijakan anggaran yang dibahas sesuai jadwal	0%	0%	0%

a.	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	0 Dok	0 Dok	0%
	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	0 Dok	0 Dok	0%
c.	Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	0 Dok	0 Dok	0%
	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	0 Dok	0 Dok	0%
e.	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	0 Dok	0 Dok	0%
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terseleenggaranya kegiatan pengawasan DPRD sesuai jadwal yang Rencanakan	Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai rencana kerja DPRD	100%	60%	60%
f.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	1 Lap	1 Lap	100%
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Bidang Infrastruktur	1 Lap	1 Lap	100%
h.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Bidang Perekonomian	1 Lap	1 Lap	100%
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	0 dokumen	0 dokumen	0,00%
j.	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	0 dokumen	0 dokumen	0,00%

IV	Peningkatan Kapasitas DPRD	Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	75%	75%
k	Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
l	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1 Orang	1 Orang	100%
m	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 Orang	5 Orang	100%
N	Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
V	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Persentase Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	100%	100%
o	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
p	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	35 Dokumen	35 Dokumen	100%
VI	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan kode etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%	100%	100%
Q	Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya penegakan kode etik secara transparan dan akuntabel	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	1 Laporan	100%
VII	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Terselenggaranya kesepakatan dan kesepakatan antar pihak terkait dalam kerja sama daerah	Persentase Dokumen Pembahasan Kerja Sama Daerah yang dihasil tepat waktu	100%	18,52%	18,52%
r	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	27 Dokumen	5 dokumen	18,52
VIII	Fasilitasi Tugas DPRD	Tersusunnya laporan pelaksanaan fasilitasi tugas DPRD	Persentase Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD secara tepat waktu	100%	100%	100%
s	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	27 Laporan	27 Laporan	100%
t	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	3 Laporan	3 Laporan	100%

9. KESIMPULAN

- ❖ Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur” dengan Indikator Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda yaitu 0% diperoleh dari rumus perhitungan :

$$= \frac{\text{Realisasi Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda}}{\text{Target Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda}} \times 100$$

Target Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda

$$= \frac{0}{25} \times 100$$

$$= 0$$

- ❖ Alokasi anggaran yang disediakan pada Dokumen DPA-SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026 dalam pencapaian kinerja sasaran yaitu : Rp1.672.226.100,- dan realisasi keuangan sebesar Rp367.574.896- atau 21,98%.

SASARAN STRATEGIS II

“MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PERANGKAT DAERAH”

Sasaran strategis ini bukan merupakan indikator kinerja utama dengan indikator kinerja Nilai Akip Perangkat Daerah (n-1), capaian kinerja ini dari indikator kinerja tersebut disajikan pada tabel berikut :

Tabel 13
Capaian Indikator Kinerja Sasaran II
Target Terhadap Realisasi
Tahun 2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2026		
			Target	Realisasi	Capaian

1	Nilai Akip Perangkat Daerah (n-1)	Nilai	75	70,80	94,40
Rata-rata Capaian Kinerja				94,40	

Analisis capaian kinerja sasaran strategis “**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**” berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :

NILAI AKIP PERANGKAT DAERAH (n-1)

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2026

Target kinerja dan realisasi kinerja Nilai SAKIP (n-1) Sekretariat DPRD pada Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 14
Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja
Nilai AKIP Perangkat Daerah Tahun 2026

Sasaran II :	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD		
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2026		
NILAI AKIP Perangkat Daerah (n-1)	Target	Realisasi	Capaian
	75	70,80	94,40

Formulasi Indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah “**NILAI AKIP Hasil LHE Inspektorat**”.

Target Indikator
realisasi belum dapat

NILAI AKIP PERANGKAT DAERAH (n-1)

Inspektorat Kabupaten Luwu Timur. Sehingga hanya dapat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 dengan **Nomor 700.1.2.1/101/III/TKAB** Tanggal **11 Maret 2025** terhadap 4 (empat) komponen

besar manajemen kinerja yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2025, Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur memperoleh nilai 70,80 dengan kategori BB, realisasi tersebut dibawah target yang direncanakan.

Adapun rincian komponen penilaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 14
Komponen Penilaian Kinerja
Terhadap Dokumen LKj Tahun 2025
Sekretariat DPRD Kab Luwu Timur

OPD	Komponen Dinilai	Bobot	Nilai
Sekretariat DPRD	Perencanaan Kinerja	30.00	21.60
	Pengukuran Kinerja	30.00	20.40
	Pelaporan Kinerja	15.00	10.80
	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	18.00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			70.80
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

2 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2026 dengan Tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir atau 5 Tahun berturut-turut (2025-2029)

Capaian Nilai AKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur selama 5 (lima) Tahun 2025-2029, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 15
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2026 dengan
tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran II	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD												Target Tahun 2026
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	

NILAI AKIP Perangkat Daerah (n-1)	75	71,10	94,80	75	76,85	102,47	75	70,80	94,40	75	70,80	94,40	75
--	----	-------	-------	----	-------	--------	----	-------	-------	----	-------	-------	----

Sumber : LHE Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana target setiap tahunnya dapat tercapai dengan mempertahankan realisasi nilai direncanakan. Dalam pencapaian target ataupun untuk mempertahankan Nilai AKIP yang diperoleh, ada beberapa yang harus dipenuhi yaitu :

- a) Melakukan Reviu Dokumen Renstra secara berkala.
- b) Menyelaraskan dokumen Renstra OPD dengan RPJMD.
- c) Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
- d) Melakukan evaluasi/monitoring terhadap pencapaian target Rencana Aksi Kinerja dan Perjanjian Kinerja.
- e) Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang
- f) Membuat mekanisme pengumpulan data kinerja
- g) Melakukan evaluasi program dan kegiatan
- h) Melakukan monitoring pencapaian target kinerja eselon III dan IV
- i) Melakukan pemantaua mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya
- j) Mempublikasikan dokumen Renstra, PK, IKU dan LAKIP pada website Instansi Pemerintah
- k) Menindaklanjuti rekomendasi LHE Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Tabel 16
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025
Terhadap Jangka Menengah

Sasaran II :	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Target Akhir Renstra 2026	% Capaian s/d 2025 terhadap target akhir
---------------------	--	----------------------------------	---

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi			Renstra 2026
	Tahun 2025	realisasi sampai dengan tahun Tahun 2025		
NILAI AKIP Perangkat Daerah	70,80	70,80	75	94,40

Sumber : Dokumen RPJMD, Renstra dan Lakip Sekretariat DPRD

Berdasarkan tabel tersebut terlihat perbandingan capaian kinerja sampai sampai dengan Tahun 2025 yaitu 70,80 dengan Predikat BB walaupun belum mencapai target jangka menengah. Hal tersebut dapat dicapai karena adanya dukungan Pemerintah daerah dalam pelaksanaan Coaching Klinik untuk Penguatan SAKIP OPD dan Pemda. Dampaknya yaitu adanya perbaikan dokumen pendukung SAKIP dan beberapa rekomendasi hasil LHE Kementerian PAN-RB dan LHE Inspektorat telah ditindaklanjuti oleh OPD. Diantaranya yaitu :

1. Reviu Dokumen Renstra,
2. Perbaikan Perjanjian Kinerja dilengkapi dengan defenisi operasional,
3. Perbaikan dokumen LKJ sesuai sistematika Permenpan 53 Tahun 2014,
4. Perbaikan Dokumen IKU dilengkapi dengan defenisi operasional dan formulasi,
5. Perbaikan Penjenjangan Kinerja yang telah dilengkapi dengan Crosscutting lintas OPD dsb.

4. Perbandingan Dengan Target Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja yang telah dicapai salah satunya dengan cara membandingkan realisasi kinerja yang telah dicapai dengan realisasi kinerja daerah/instansi lain. Perbandingan antara Tingkat capaian Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dengan daerah lain dalam pencapaian Indikator Strategis di Tahun 2026.

Tabel 17

**Perbandingan Nilai SAKIP
Sekretariat DPRD Prov. Sulawesi Selatan dengan
Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur Tahun 2026**

Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur	Selisih	Presentase Capaian AKIP Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur Terhadap SAKIP Sekretariat Prov. Sulawesi Selatan
82*	75*	7	91,46%

Berdasarkan pada tabel diatas **Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan** mendapatkan **nilai 82 (BB) dengan capaian 91,46%** dari target 75. Nilai SAKIP antara Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terdapat selisih nilai sebesar 7. Dimana Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur harus semakin meningkatkan kinerja sehingga dapat meningkatkan nilai AKIP yang lebih baik dimasa yang akan datang.

5. Analisis Penyebab keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan

✚ Analisis penyebab keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran, yaitu :

1. Koordinas yang optimal dengan PPTK, PPK dan Pejabat Pengadaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan secara periodik;
3. Penyusunan dokumen perencanaan (Renstra, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Aksi) semakin selaras dan terukur.

✚ Hambatan/Kendala

1. Evaluasi internal belum berbasis rencana aksi yang jelas dan terukur.
2. Efektivitas penggunaan anggaran belum sepenuhnya mencerminkan pencapaian kinerja.
3. Indikator kinerja belum sepenuhnya berorientasi pada outcome (hasil), masih dominan output (kegiatan).

✚ Solusi

1. Melaksanakan evaluasi kinerja internal berbasis rencana aksi dan indikator yang jelas.
2. Menjadikan capaian kinerja sebagai dasar dalam penentuan alokasi anggaran.

- Menindaklanjuti hasil evaluasi secara konsisten sebagai dasar perbaikan kinerja.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

✚ Efisiensi Anggaran

- Pemanfaatan teknologi (rapat daring, digitalisasi dokumen) untuk mengurangi biaya. Beberapa kali secretariat DPRD melakukan Bimtek secara Daring.

✚ Efisiensi Sumber Daya

- Waktu pelaksanaan kegiatan belum efisien, masih terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
- Penggunaan teknologi informasi (e-Kinerja/SIPD) sudah berjalan, namun belum dimanfaatkan secara optimal sebagai alat pengendalian kinerja

✚ Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel 18
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

Sasaran II	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target Tahun 2026	Realisasi Tahun 2026	Capaian (%)	Alokasi Anggaran TW I Tahun 2026	Realisasi TW I Tahun 2026	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP (-N)	75	70,80	94,40	12.032.162.697	8.249.888.969	68,57

Tabel 19
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran II	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
------------	-------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------

1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	94,40	68,57	25,83

Pencapaian sasaran pendukung sebesar 94,40% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 68,57%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 25,83%. Adapun perhitungan persentase efisiensi biaya dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned}
 &= 100\% - \left\{ \frac{\text{Jumlah Realisasi Biaya}}{\text{Jumlah Alokasi Biaya}} \right\} \times 100\% \\
 &= 100\% - \frac{8.249.888.969}{12.032.162.697} \times 100\% \\
 &= 100\% - 68,57\% \\
 &= \mathbf{31,43\% \text{ Efisiensi Anggaran}}
 \end{aligned}$$

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

✚ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

Indikator Program yaitu Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan **formulasi : jumlah capaian kinerja seluruh kegiatan dibagi jumlah seluruh kegiatan.**

Target 100 % dan realisasi 76 % dengan capaian kinerja 76 %, dan menyerap anggaran sebesar 68,57%,-. Capaian kinerja program kurang dari target karena beberapa kegiatan capaian kinerjanya >100%, sehingga berpengaruh terhadap kinerja program secara keseluruhan.

✚ Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung

Tabel 20
Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target TW I 2026	Realisasi tahun 2026	Capaian (%)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	Persentase penunjang perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	76%	76%
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan Evaluasi	Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah	100%	25%	25%
a.	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	0 Dok	0 Dok	0%
b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dok	0 Dok	0%
c.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dok	0 Dok	0%
d.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Lap	3 Lap	100%
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	100%	100%	100%
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjanganASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Org	46 Org	100%
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	3 Lap	3 Lap	100%

3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	Meningkatnya Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah Yang Di Tatausahakan	Persentase Aset Teradministrasi	100%	100%	100%
a.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	1 Lap	100%
4.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningktanya Kinerja Administrasi Kepegawawain Perangkat daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian Sesuai Standar	100%	50%	50%
a.	Pendataan dan Pegolahan Administasi Kepegawaian	Tersedianya laporan Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Lap	3 Lap	100%
b.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi aparatur	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Org	0 org	0
5.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	75%	75%
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	100%
b.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	0%
c.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediaka	2 Paket	1 Paket	50%
d.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan	6 Paket	3 Paket	50%
e.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	100%
f.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dok	3 Dok	100%
g.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya tamu yang difasilitasi kunjungannya	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	3 Lap	3 Lap	100%
h.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29 Lap	29 Lap	100%

6.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Meningkatnya Barang Daerah Urusan Pemerintah Yang Diadakan	Persentase Kesesuaian Pengadaan Barang Dengan Rencana Kebutuhan	0%	0%	0%
a.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas untuk kepentingan dinas	jumlah kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang tersedia	0 unit	0 unit	0%
b.	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel untuk kebutuhan kantor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 unit	0 unit	0%
c.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya untuk kebutuhan kantor	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	0 unit	0 unit	0%
d.	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0 unit	0 unit	0%
7.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Teradministrasinya surat masuk dan surat keluar dengan baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Lap	3 Lap	100%
b.	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening bulanan telepon, air dan Listrik kantor demi kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Lap	3 Lap	100%
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Lap	3 Lap	100%
8.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Barang milik Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dipelihara	Persentase Barang dipelihara Secara Berkala	100%	100%	100%
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	9 unit	9 unit	100%
b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dengan baik	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara	32 unit	32 unit	100%
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya dengan baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Rehabilitasi	1 unit	1 unit	100%
d.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 unit	3 unit	100%

9	Kegiatan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Meningkatnya Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan Yang Disediakan	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100%	33%	33%
a.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	:Jumlah Bulanan gaji Dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD Yang Terbayarkan a	35 orang	35 orang	100%
b.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	0 Paket	0 Paket	0%
c.	Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD	Terlaksananya Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD	Jumlah Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD	10 orang	0 orang	0%
10	Layanan Administrasi DPRD	Meningkatnya Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD	100%	100%	100%
a.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Terlaksananya Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Yang Disediakan	3 paket	3 paket	100%

Dokumen Kegiatan Penunjang SKPD

Dokumen Pelaksanaan Rapat Money Internal OPD Triwulan I TA. 2026

PEMERINTAH KABUPATEN LUMUWU TIMUR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jln. Soekarno-Hatta, Muhi 52011
Website: www.luwutimurkab.go.id Email: sekretariat@dlw.luwutimurkab.go.id

Muhi, 05 April 2026

Nomor : 000.3.11/ka/Se/ DPRD
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : 1. Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Yth. 1. Para Kepala Bagian
2. Pejabat Eselon III & IV
3. Pejabat Fungsional

d. Tempat.

Dalam Rangka Pelaksanaan Rapat Internal terkait Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026, dengan ini mengundang untuk hadir dalam rapat yang dilaksanakan pada:

Muhi
Tanggal : 13 April 2026
Waktu : Pukul 10.00 - Selesai
Tempat : Ruang Sekretaris DPRD
Agenda : Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026
Catatan : Mengingat kehadiran seluruh Staf
Demikian disampaikan, atas Perhatiannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DPRD













Rahmatul Huda, S.H., M.H.
Pemuda Ujama Muda
No. 172/114/2020/KA/1/025











Terbilang
1. Lembar

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMUWU TIMUR
MULLI SORE
Email : sekretariat@dlw.luwutimurkab.go.id Website : www.luwutimurkab.go.id

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : 05 April 2026
Waktu : 10.00 - Selesai
Tempat : Muhi
Agenda : Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026

NO	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN	TANDA TANGAN
1	ALFANUS	Salasana	L	
2	Ariswandi	Keagamaan	L	
3	Alifan	Kep. Badan	L	
4	Alfanus	Kep. Badan	L	
5	Rafael	Keagamaan	P	
6	Chabara	Perencanaan	L	
7	Kusnadi	Fungsional	P	
8	Susana	Keagamaan	P	
9	Hegering	Keagamaan	P	
10	A. Basa	Keagamaan	P	
11	Henderson	"	L	

NO	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN	TANDA TANGAN
12	Kusnadi	Staf	P	
13	Susana	Staf	P	
14	Susana	Staf	P	
15	Indrawati	Staf	P	
16	Azyla Putri W	"	P	
17	Kusnadi	Kep. Badan	P	
18	Fadila	Staf	L	
19	Citra	"	L	
20	Indrawati	Staf	L	
21	Akus s. an	Staf	L	

DOKUMENTASI KEGIATAN RAPAT EVALUASI KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2026



1. KESIMPULAN

- ✓ Capaian Kinerja Sasaran 'Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yaitu 100% diperoleh dari rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi Kinerja} \\ = \frac{\text{Target Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{76} \times 100\%$$

$$= 24\%$$

- ✓ Alokasi anggaran yang disediakan pada Dokumen DPA-SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur TW I Tahun Anggaran 2026 dalam pencapaian kinerja sasaran yaitu **Rp12.032.162.697,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp8.249.888.969,-** atau **68,57%**.

1.3 REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan serta analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Anggaran Perubahan APBD untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026 adalah sebesar **Rp. 34.858.093.305,-** (*Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Tia Ratus Lima Rupiah*), terdiri dari belanja pegawai **Rp26.113.048.235,-** belanja barang dan jasa **Rp6.264.420.050,-** , belanja modal peralatan dan mesin **Rp1.968.625.020,-**. Dan belanja modal gedung dan bangunan **Rp. 512.000.000,-**

Anggaran tersebut digunakan untuk pembiayaan 1 program, 10 kegiatan dan 39 sub kegiatan. Adapun target dan realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2025 dan realisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 21
Realisasi Anggaran Tahun 2026

No	Belanja	Jumlah Anggaran	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5
	BELANJA	34.858.093.305	8.249.888.969	23,67
1	BELANJA OPERASI	32.377.468.285	8.249.888.969	25,48
	Belanja Pegawai	26.113.048.235	7.382.926.433	28
	Belanja Barang dan Jasa	6.264.420.050	866.962.536	14
2	BELANJA MODAL	2.480.625.020	0	0
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.968.625.020	0.00	0.00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	512.000.000	0.00	0.00
Total		34.858.093.305	8.249.888.969	23,67

Tabel 22

**Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun 2026**

No	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN I (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2025	
				(Rp.)	(%)
	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
					(6/5*100)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	34.858.093.305	12.032.162.697,00	8.249.888.969,00	68,57
01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.341.350	24.821.900,00	1.772.093	7,14
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.846.950	20.862.000,00	1.772.093	8,49
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.972.600			#DIV/0!
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5.803.800			#DIV/0!
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.718.000	3.959.900		-
02	Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah	4.676.027.079	2.333.979.629	997.384.406	42,73
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.602.963.279	2.301.497.829	996.106.806	43,28
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	73.063.800	32.481.800	1.277.600	3,93
03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	30.507.150	12.331.788,00	4.989.000	40,46
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	30.507.150	12.331.788	4.989.000	40,46
04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	361.762.500	97.563.125,00	10.850.000	11,12
8	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	52.020.000	20.127.500	10.850.000	53,91
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	309.742.500	77.435.625		-

05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.939.702.850	278.186.338,00	109.762.366	39,46
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.400.500	8.850.125	6.713.000	75,85
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	853.540.000			#DIV/0!
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.470.000	1.617.500	250.000	15,46
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	137.771.850	40.788.588	9.335.000	22,89
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.038.000	4.259.500	1.042.000	24,46
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	265.900.000	66.475.000		-
16	Fasilitas Kunjungan Tamu	143.925.000	55.781.250	4.947.000	8,87
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	479.657.500	100.414.375	87.475.366	87,11
06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.612.678.020		-	#DIV/0!
18	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81.646.020			
19	Pengadaan Mebel	25.000.000			
20	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	512.000.000			#DIV/0!
21	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	994.032.000			#DIV/0!
07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	956.382.400	302.871.725,00	199.347.042	65,82
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	51.343.900	12.830.975	5.268.700	41,06
23	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	500.038.500	189.790.750	133.578.342	70,38
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	405.000.000	100.250.000	60.500.000	60,35
08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	620.960.000	192.175.000,00	100.167.435	52,12

25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	217.160.000	48.000.000	32.754.435	68,24
26	Pemeliharaan Mebel	44.500.000	11.125.000		
27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.300.000	34.300.000	9.015.000	26,28
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	145.000.000	36.250.000	15.020.000	41,43
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	125.000.000	62.500.000	43.378.000	69,40
09	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	22.069.324.956	8.166.233.192,00	6.386.819.627	78,21
30	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	21.510.084.956	8.106.233.192	6.386.819.627	78,79
31	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	349.240.000			#DIV/0!
32	Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD	210.000.000	60.000.000		-
10	Layanan Administrasi DPRD	2.510.407.000	624.000.000,00	438.797.000	70,32
33	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	2.510.407.000	624.000.000	438.797.000	70,32

✓ **Permasalahan dan Solusi tentang Penyerapan Anggaran**

✓ **Tabel 22**

✓ **Permasalahan dan Solusi**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PERMASALAHAN TERKAIT PENCAPAIAN KINERJA (SECARA TEKNIS BAIK FAKTOR INTERNAL MAUPUN FAKTOR EKSTERNAL)	PERMASALAHAN TERKAIT REALISASI KEUANGAN	SOLUSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1,0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			

01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indikator jumlah dokumen perencanaan yang disusun. Memiliki target kinerja TW I sebesar 0% dan realisasi sebesar 0%.disebabkan karena kegiatan tersebut akan dilaksanakan diTW II dan TW III	TerdapatBelanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar 780.000 yg belm terealisasi dikarenakan msih dalam proses adm Keuangan., Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan yg blm terealisasi di karenakan Masih Menunggu SK, Belanja Perjadin .yang sifatnya dipersiapkan apabila ada hal-hal terkait Perencanaan yang akan dikoordinasikan Dalam PropinsiJumlah Anggaran yang diminta pada TW 1 sebesar Rp. 9.934.700,- Realisasi Keuangan Rp 5.340.700 atau 38,46% (Terdapat Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Coverdan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer yg belum terealisasi)	Menyusun jadwal pengadaan yang lebih terencana agar tidak menumpuk di akhir triwulan
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indikator jumlah dokumen rka- skpd yang disusun tepat waktu dengan target Tw I 0 dokumen dan terealisasi 0 dokumen serta capaian kinerja sebesar 0%, di Karenakan Sub Kegiatan ini di laksanakan di TW III dan TW IV.	Realisasi Rp,- karena kegiatan tersebut akan dilaksanakan diTW II dan TW III	Menyusun rencana kerja yang terstruktur agar penyusunan dokumen dapat diselesaikan tepat waktu pada triwulan pelaksanaan.Sub Kegiatan ini dilaksanakan di TW II
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Indikator jumlah dokumen DPA- skpd yang disusun tepat waktu dengan target Tw I 0 dokumen dan terealisasi 0 dokumen serta capaian kinerja sebesar 0%, di Karenakan Sub Kegiatan ini di laksanakan di TW III dan TW IV.	Realisasi Rp,- karena kegiatan tersebut akan dilaksanakan diTW II dan TW III	Menyusun rencana kerja yang terstruktur agar penyusunan dokumen dapat diselesaikan tepat waktu pada triwulan pelaksanaan.Sub Kegiatan ini dilaksanakan di TW III dan IV
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator : Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu .T dengan target TW I 3 dokumen dan terealisasi 3 dokumen serta capaian kinerja sebesar 100%.Yaitu : LKJ TW I, PK Pokok Tahun 2026 dan Rencana Aksi	Belum terealisasinya belanja tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain proses administrasi pengadaan ecatalog pad sub bagian Program dan Keuangan yang belum optimal , penjadwalan kegiatan rapat yang akan dilaksanakan di TW II awal bulan April thn 2026.	Mengoptimalkan perencanaan kebutuhan barang berdasarkan jadwal kegiatan agar pengadaan dapat dilakukan tepat waktu dan sesuai kebutuhan.
2	Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah			

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji Dan Tunjangan ASN Yang Terbayarkan Target TW I 46 Orang dan Terealisasi 46 Orang atau 100%	Pada kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, alokasi anggaran kas Triwulan I sebesar Rp2.301.497.829 dengan realisasi sebesar Rp996.106.806, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.305.391.023. Anggaran kas TW I lebih besar di kaenakan untuk mengcover belanja gaji bulan berikutnya, karena pada akhir triwulan biasanya dilakukan pergeseran anggaran dan/atau kegiatan. Kondisi ini berdampak pada penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) pada triwulan berikutnya yang baru dapat dilakukan setelah proses pergeseran selesai, sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam pembayaran gaji dan tunjangan ASN.	Meningkatkan akurasi perencanaan kas triwulanan, sehingga alokasi anggaran lebih proporsional sesuai kebutuhan riil setiap bulan.
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran skpd dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran skpd yang disusun tepat waktu, Dengan Target 3 Laporan dan terealisasi 3 Laporan atau 100%	Pada kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, alokasi anggaran kas Triwulan I sebesar Rp2.301.497.829 dengan realisasi sebesar Rp996.106.806, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.305.391.023. Anggaran kas TW I lebih besar di kaenakan untuk mengcover belanja gaji bulan berikutnya, karena pada akhir triwulan biasanya dilakukan pergeseran anggaran dan/atau kegiatan. Kondisi ini berdampak pada penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) pada triwulan berikutnya yang baru dapat dilakukan setelah proses pergeseran selesai, sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam pembayaran gaji dan tunjangan ASN. Jumlah anggaran TW I Rp16.327.700,- terealisasi sebesar Rp14.435.700,-, atau 88,41%	Akan dilaksanakan di TW II
3	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Indikator Capaian Kinerja :Jumlah Bulanan gaji Dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD Yang Terbayarkan 35 Orang Terealisasi 35 Orang atau 100%Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah jumlah bulanan gaji dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD yang terbayarkan, target kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 ditetapkan sebanyak 35 Orang, hingga akhir Triwulan I telah terealisasi 35 Orang, sehingga capaian kinerja fisik mencapai 100%.	Pada kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, alokasi anggaran kas Triwulan I sebesar Rp2.301.497.829 dengan realisasi sebesar Rp996.106.806, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.305.391.023. Anggaran kas TW I lebih besar di kaenakan untuk mengcover belanja gaji bulan berikutnya, karena pada akhir triwulan biasanya dilakukan pergeseran anggaran dan/atau kegiatan. Kondisi ini berdampak pada penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) pada triwulan berikutnya yang baru dapat dilakukan setelah proses pergeseran selesai, sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam pembayaran gaji dan tunjangan ASN. Jumlah anggaran Rp 6.621.023.559,- terealisasi sebesar Rp 5.945.175.147,- atau 89,79	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			

	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah laporan penatausahaan BMD SKPD yang disusun tepat waktu adalah 4 dokumen dengan target untuk triwulan I sebanyak 1 dokumen. Dan telah terealisasi sebanyak 1 dokumen dengan capaian kinerja 25 % target kinerja ini sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan	Realisasi anggaran pada sub kegiatan ini untuk Triwulan I ditargetkan Rp. 12.331.778,- dan terealisasi sebesar Rp 4.989.000,- atau sebesar 40,46 % disebabkan karena realisasi untuk Honor Pengurus Barang t belum teralisasi karena masih menunggu proses penerbitan SK pemberian Honor	Percepatan proses administrasi penerbitan SK Pemberian Honor dengan melakukan koordinasi pada bagian anggaran DPKAD, realisasi anggaran dapat dioptimalkan pada Triwulan II.
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian sebanyak 4 Dokumen laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan . Pada triwulan I ditargetkan 1 dokumen dan terealisasi 1 Dokumen yaitu Penyusunan Bezetting Kebutuhan Pegawai , Kenaikan Gaji Berkala, Pengusulan Kenaikan Pangkat, Penyusunan E-Lapkin 2026, Penyusunan Kontrak UJ 2026 dengan capaian kinerja 25 % target kinerja ini sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan	Pada sub kegiatan ini untuk Triwulan I ditargetkan Rp. 20.127.500,- dan terealisasi sebesar Rp 10.850.000,- atau sebesar 53,91 % Belum optimalnya realisasi anggaran disebabkan karena belanja makan dan minum rapat tidak terealisasi, yang disebabkan kegiatan rapat belum dilaksanakan atau mengalami penjadwalan ulang pada Triwulan berikutnya.	Upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Rapat dengan menyusun jadwal untuk kegiatan rapat pada Triwulan II. sehingga realisasi anggaran dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan ditargetkan sebanyak 27 orang Pegawai, triwulan I ditargetkan sebanyak 6 Orang dan terealisasi sebanyak 6 Orang atau 22,22 % pelaksanaan Bimtek tersebut dilaksanakan secara daring target kinerja ini sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan	Pada sub kegiatan ini ditargetkan untuk Triwulan I sebesar Rp. 77.435.625,- dan terealisasi sebesar Rp 0,- atau sebesar 0 % disebabkan jadwal pelaksanaan Bimtek secara tatap muka bertepatan dengan kegiatan yang bersifat prioritas serta penyesuaian metode pelaksanaan menjadi daring sehingga tidak memerlukan penggunaan anggaran sebagaimana yang telah direncanakan	Melakukan penjadwalan ulang dan koordinasi lebih awal dengan pihak penyelenggara guna mendorong realisasi anggaran pada triwulan berikutnya dan Melakukan penyesuaian perencanaan anggaran dengan metode pelaksanaan kegiatan (daring atau luring) agar lebih realistis dan tepat sasaran.
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan. Target 15 paket teeakisasi 15 Paket atau 100% target kinerja ini sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan	Target Triwulan I sebesar Rp. 8.850.125,- dan teralisasi sebesar 6.713.000,- atau sebesar 75,85 % anggaran yang tersedia sifatnya disediakan dan digunakan sesuai dengan kebutuhan	Melakukan perencanaan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan secara lebih rinci dan berbasis prioritas agar penggunaan anggaran lebih optimal
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan target sebanyak 8 paket yang akan dilaksanakan pada triwulan II target kinerja ini sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan	Ditargetkan pada triwulan II dengan target Anggaran sebesar Rp. 853.540.000,-	Melakukan persiapan dokumen perencanaan dan pengadaan sejak Triwulan I agar pelaksanaan pada Triwulan II dapat berjalan tepat waktu
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan. Target 2 Jenis yaitu Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Belanja Pembelian Galon) tidak teralisasi dan Belanja Bahan-Bahan Lainnya(Pembelian tabung Gas) terealisasi 1 Jenis atau 50 %	Target Triwulan I sebesar Rp. 1.617.500 capaian realisasi sebesar Rp. 250.000,- atau sebesar 15 %, anggaran yang tersedia sifatnya disediakan dan digunakan sesuai dengan kebutuhan	Meningkatkan koordinasi dengan pengelola kegiatan dan pengguna barang untuk memastikan kebutuhan riil sehingga pengadaan dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah Paket Bahan Logistik Yang Disediakan . Target 6 Paket realisasi 3 paket atau 100 % target kinerja ini sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan	Target untuk triwulan I sebesar 40.788.588,- realisasi sebesar 9.355.000 atau sebesar 22,89% disebabkan Belanja Sewa Mebel dan Belanja Sewa Peralatan Studio Audio yang dipersiapkan untuk open House Pimpinan DPRD tidak direalisasikan	Melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan (seperti sewa mebel dan peralatan studio) agar anggaran dapat dialihkan ke kebutuhan lain yang lebih prioritas
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah barang cetakan dan penggandaan disediakan 6 paket realisasi 6 paket atau 100% target kinerja ini sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan	Target untuk Triwulan I sebesar 4.259.500,- realisasi sebesar Rp. 1.042.000 atau sebesar 24,46 % dikarenakan Penyesuaian kebutuhan riil cetakan dan penggandaan bahwa Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan lebih sedikit dibandingkan perencanaan awal, seiring dengan berkurangnya kebutuhan dokumen fisik dan optimalisasi penggunaan dokumen digital	Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran pada triwulan berikutnya untuk kebutuhan cetakan yang bersifat prioritas dan mendesak
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan di targetkan 12 Dokumen terdiri dari Koran Lokal, Surat Kabar Nasional, dan surat kabar Regional terealisasi 3 dokumen atau sebesar 25 % target kinerja ini sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan	Target untuk Triwulan I sebesar Rp. 66.475.000,- realisasi sebesar Rp. 0 atau sebesar 0 % menunggu persetujuan Pimpinan penyesuaian kebutuhan aktual Jumlah dan jenis bahan bacaan yang berlangganan tanpa mengurangi jumlah dokumen yang menjadi indikator kinerja	berkoordinasi dengan pimpinan agar persetujuan langganan koran dapat di setuju sehingga pembayaran pada triwulan berikutnya bisa optimal sesuai dengan target keuangan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah laporan fasilitasi Kunjungan tamu ditargetkan 12 laporan terelisasi 3 Laporan atau jumlah penerimaan tamu yang diterima sekretariat DPRD setiap bulannya terealisasi 25 % Target target kinerja ini sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan	Target untuk Triwulan I sebesar Rp. 55.781.250,- realisasi sebesar Rp. 4.947.000 atau sebesar 8,87 % karena jumlah kunjungan tamu di kantor berkurang dan bertepatan bulan ramadhan , sehingga realisasi belanjamakanan minum tamu sesuai dengan kebutuhan	Mengoptimalkan pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu pada triwulan berikutnya sehingga sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD di targekan 110 laporan dan teralisasi sebanyak 29 laporan atau 26,36 % ,target kinerja ini sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan	Target untuk Triwulan I sebesar Rp.100.414.375,- realisasi sebesar Rp. 87.475.366 atau sebesar 87,11 % yang terdiri Belanja Jasa Tenaga Supir tidak terealisasi secara maksimal karena jumlah sopir yg ada sebanyak 4 orang tetapi yang dianggarkan 6 orang , Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Realisasi anggaran yang cukup tinggi ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi, baik yang dilaksanakan di dalam daerah maupun luar daerah, sesuai dengan kebutuhan operasional dan agenda kerja yang telah direncanakan	Akan melakukan penyesuaian jumlah tenaga sopir yang sesuai dengan kebutuhan.
06				
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah unit Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang disediakan ditargetkan pada Triwulan II sebanyak 2 Unit , target kinerja ini sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ditargetkan dilaksanakan pada Triwulan II	Melakukan persiapan proses pengadaan sejak Triwulan I, penyusunan spesifikasi teknis, dokumen administrasi sehingga proses pencairan dana sesuai anggaran Kas pada triwulan ke II

	Pengadaan mebel	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah unit paket mebel yang disediakan ditargetkan pada triwulan II sebanyak 3 Unit target kinerja ini sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel ditargetkan dilaksanakan pada Triwulan II	Melakukan persiapan percepatan proses pengadaan dengan Mengoptimalkan metode pengadaan yang lebih cepat dan efisien e-purchasing atau pengadaan langsung sesuai ketentuan). agar pelaksanaan pada Triwulan II dapat berjalan tepat waktu
	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah unit Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan ditargetkan pada triwulan I dan 2 Unit target kinerja ini sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar Rp. 8.250.000 terdiri dari Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Administrasi) target sebesar Rp. 3.000.000,-realisasi Rp. 0,- atau 0 % dan Belanja Modal bangunan Gedung Tempat Ibadah (Administrasi) target sebesar Rp. 5.250.000,- realisasi Rp. 0,- atau 0% disebabkan Keterlambatan koordinasi dengan pihak terkait (perencana teknis/penyedia jasa) sehingga pelaksanaan fisik belum dapat dimulai	Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pihak perencana teknis dan penyedia jasa guna Mempercepat penyelesaian dokumen teknis (gambar, RAB, dan spesifikasi) sebagai dasar pelaksanaan pengadaan
	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan ditargetkan 14 Unit target kinerja ini sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar ditargetkan dilaksanakan pada Triwulan II dan triwulan III	Menyusun perencanaan pengadaan secara bertahap (phasing), dengan pembagian target 14 unit antara Triwulan II dan Triwulan III agar pelaksanaan Menyelesaikan seluruh dokumen perencanaan dan spesifikasi teknis sebelum awal Triwulan II sehingga proses pengadaan dapat segera dimulai
07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah laporan jasa surat menyurat ditargetkan 12 laporan terelisasi 3 Laporan atau 25 % target kinerja ini sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan	Target triwulan I sebesar Rp. 12.835.975 capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 5.268.700 atau 41,05 % disebabkan anggaran yang disiapkan disesuaikan dengan kebutuhan riil dan sisa hasil nego ekatalog	Melakukan penyesuaian perencanaan anggaran berdasarkan kebutuhan riil agar alokasi dana lebih akurat dan efisien pada triwulan berikutnya dan Mengoptimalkan pemanfaatan sisa hasil negosiasi e-katalog untuk mendukung kegiatan lain yang masih dalam satu sub kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik di targetkan 12 laporan terdiri Belanja Tagihan Listrik (Gedung Kantor, rumah jabatan pimpinan, Mesjid DPRD) , Belanja Tagihan Air (Rujab, kantor dan Mesjid), Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan terealisasi 3 Laporan atau 25 % target kinerja ini sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan	target triwulan I Rp. 189.790.750 capaian realisasi sebesar Rp. 133.578.342 atau 70,38 % karena anggaran yang disiapkan bersifat disediakan dan menyesuaikan harga tarif setiap bulannya	Melakukan pengendalian dan efisiensi penggunaan energi (listrik dan air) di lingkungan kantor, rumah jabatan, dan masjid tanpa mengganggu operasional

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah laporan penyediaan jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan ditargetkan 12 laporan pada triwulan I teralisasi 3 laporan atau 25 %. target kinerja ini sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan	target triwulan I Rp. 100.250.000 capaian realisasi sebesar Rp. 60.500.000 atau 60,35 % disebabkan realisasi belanja jasa tenaga kebersihan masih dalam proses persetujuan pergantian, belanja jasa keamanan (ajudan) tidak teralisasi dikarenakan telah ada ajudan Ketua DPRD yang berasal dari Satpol PP, dan Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja(PPPK) Paru waktu pada Jabatan Operator layanan Operasional telah mengundurkan diri sebanyak 1 orang	Melakukan revisi atau penyesuaian anggaran agar lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan aktual di lapangan
08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indikator Capaian Kinerja : adalah Jumlah Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya ditargetkan 11 Unit teralisasi 9 unit atau 81,82 %	Target pada triwulan I sebesar Rp. 48.000.000 teralisasi sebesar Rp. 32.754.435,- atau 68,24 % anggaran yang tersedia sifatnya disediakan dan digunakan sesuai dengan kebutuhan	Mengoptimalkan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan riil dengan tetap menjaga kondisi kendaraan agar selalu layak operasional Mengidentifikasi kendaraan yang belum dipelihara atau dibayarkan pajaknya (2 unit) dan segera ditindaklanjuti pada triwulan berikutnya
	Pemeliharaan Mebel	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah mebel yang dipelihara ditargetkan 8 unit untuk triwulan I ditargetkan 2 unit dan belum teralisasi atau 0 %	Target pada triwulan I sebesar Rp. 11.125.000 teralisasi sebesar Rp. 0,- atau 0 % disebabkan indentifikasi mebel yang rusak masih dalam proses pendataan oleh pengurus barang pengguna	Mempercepat proses pendataan dan identifikasi mebel yang rusak oleh pengurus barang pengguna agar segera diketahui kebutuhan pemeliharaan dan Mengoptimalkan anggaran yang tersedia pada triwulan berikutnya
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara ditargetkan 130 unit untuk triwulan I ditargetkan 32 unit teralisasi 32 unit atau 24, 62 %	Target pada triwulan I sebesar Rp. 34.300.000 teralisasi sebesar Rp. 9.015.000,- atau 26,28 % anggaran yang tersedia sifatnya disediakan dan digunakan sesuai dengan kebutuhan	Menyusun rencana pemeliharaan secara bertahap berdasarkan prioritas kondisi peralatan sehingga penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ditargetkan 4 unit untuk triwulan I ditargetkan 1 unit teralisasi 1 unit atau 25 %	Target pada triwulan I sebesar Rp. 36.250.000 teralisasi sebesar Rp. 12.235.000,- atau 33,75 % anggaran yang tersedia sifatnya disediakan dan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan	Menyusun rencana pemeliharaan/rehabilitasi secara bertahap berdasarkan tingkat kerusakan dan prioritas kebutuhan gedung agar pelaksanaan lebih terarah
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah Saran dan Prasarana Gedung kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara /Direhabilitasi. Target 3 Unit Realisasi 3 Unit atau 100%	Target pada triwulan I sebesar Rp. 62.500.000,- teralisasi sebesar Rp. 43.378.000,- atau 69,40 % anggaran yang tersedia sifatnya disediakan dan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan	Mempertahankan pola efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga capaian fisik tetap optimal dengan penggunaan anggaran yang lebih hemat
09	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			

	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Indikator Capaian Kinerja :Jumlah Bulanan gaji Dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD Yang Terbayarkan 35 Orang Terealisasi 35 Orang atau 100%Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah jumlah bulanan gaji dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD yang terbayarkan, target kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 ditetapkan sebanyak 35 Orang, hingga akhir Triwulan I telah terealisasi 35 Orang, sehingga capaian kinerja fisik mencapai 100%.	Pada kegiatanPenyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD , alokasi anggaran kas Triwulan I sebesar Rp8.106.233.192 dengan realisasi sebesar Rp6.386.819.627, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.719.413.565. Aggaran kas TW I lebih besar di kaenakan untuk mengcover belanja gaji bulan berikutnya, karena pada akhir triwulan biasanya dilakukan pergeseran anggaran dan/atau kegiatan. Kondisi ini berdampak pada penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) pada triwulan berikutnya yang baru dapat dilakukan setelah proses pergeseran selesai, sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam pembayaran gaji dan tunjanganAnggota DPRD.J	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			Dilaksanakan TW III
	Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD			
10	Layanan Administrasi DPRD			
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Yang Disediakan Target 3 Paket untuk triwulan I ditargetkan 3 Paket Terealisasi 3 paket atau 100%	Target pada triwulan I sebesar Rp. 624.000.000,- teralisasi sebesar Rp. 438.797.000,- atau 70,32 % anggaran yang tersedia sifatnya disediakan dan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan	Mempertahankan efisiensi dalam penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD tanpa mengurangi kualitas layanan dan Melakukan evaluasi rutin agar penggunaan anggaran tetap sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan

3.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN DALAM PENCAPAIAN KINERJA SASARAN OPD

Dalam rangka mencapai sasaran kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur menetapkan strategi dan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas kinerja, serta efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD.

- Menyusun dokumen perencanaan yang terintegrasi (Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja) dengan indikator yang terukur, relevan, dan berorientasi pada hasil.
- Mengoptimalkan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD secara tepat waktu, akurat, dan profesional.

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi kinerja.
- Meningkatkan kualitas penyusunan laporan kinerja (LKjIP) yang transparan, akuntabel, dan berbasis data

3.4 PENCAPAIAN KINERJA MEMPENGARUHI BUDAYA KERJA ORGANISASI

Pencapaian kinerja yang optimal tidak hanya berdampak pada terpenuhinya target organisasi, tetapi juga berpengaruh signifikan terhadap pembentukan dan penguatan budaya kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur. Budaya kerja yang baik menjadi fondasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta akuntabilitas kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Capaian kinerja yang menunjukkan tren positif, termasuk perolehan nilai SAKIP dengan kategori **BB (Sangat Baik)**, telah mendorong terbentuknya budaya kerja yang lebih profesional, disiplin, dan berorientasi pada hasil. Hal ini tercermin dalam meningkatnya kesadaran aparatur terhadap pentingnya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja yang terukur. Dengan kata lain, kinerja dan budaya kerja yang baik akan memperkuat keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain :

1. Pencapaian kinerja yang baik mendorong peningkatan kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas serta rasa tanggung jawab terhadap target yang telah ditetapkan.
2. Setiap pelaksanaan kegiatan dituntut untuk dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun kinerja, sehingga mendorong transparansi dalam pengelolaan program dan anggaran.
3. Hasil evaluasi kinerja dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan, sehingga terbentuk budaya belajar (learning organization).
4. Aparatur semakin memahami pentingnya pencapaian target kinerja yang terukur dan berdampak (outcome), bukan hanya penyelesaian kegiatan (output)

BAB 4**PENUTUP**

Laporan Kinerja TW I Tahun 2026 Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur sebagai bentuk pertanggungjawaban dan umpan balik perbaikan kinerja atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan di tahun mendatang serta dalam rangka mewujudkan *Good Governance*. Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) sasaran pendukung yang didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Kabupaten

Luwu Timur tahun 2025-2029, serta Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029.

Secara umum hasil pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dalam pencapaian sasaran TW I pada tahun 2026 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Realisasi anggaran belanja APBD Pokok tahun 2026 sebesar **Rp11.071.476.970,-** atau **21,46%** yang terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai sebesar **Rp7.382.926.433,-** atau **28%**
 - b. Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp3.688.550.537,-** atau **59%**
 - c. Belanja Modal sebesar **Rp. 0,-** atau **0%**
2. Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis I dengan indikator Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kabupaten Luwu Timur TW I Tahun 2026 sebesar **0%** dengan predikat **Sangat Rendah** , dengan target tahun 2026 adalah 75,00% dan **realisasi sebesar 0%** atau Dari 7 Ranperda yang ditargetkan pada Triwulan I, sebanyak 4 Ranperda telah memasuki proses pembahasan. Sementara itu, 3 Ranperda lainnya belum dapat disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan karena belum memenuhi kelengkapan administrasi pendukung sebagaimana informasi dari Bagian Hukum.
3. Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis I dengan indikator 2 Persentase fasilitasi Penganggaran dan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kabupaten Luwu Timur TW I Tahun 2026 sebesar **0%** dengan predikat **Sangat Rendah** , dengan target tahun 2026 adalah 100% dan **realisasi sebesar 0%** disebabkan karena siklus kegiatan penganggaran dan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD belum memasuki tahapan pelaksanaan pada periode ini. Kegiatan fasilitasi penganggaran umumnya dilaksanakan pada tahapan pembahasan perubahan APBD maupun penyusunan APBD tahun berikutnya, sedangkan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD biasanya lebih optimal dilakukan pada triwulan berikutnya setelah pelaksanaan anggaran berjalan.

Dengan demikian, belum adanya realisasi pada Triwulan I bukan menunjukkan kinerja yang rendah, melainkan karena kegiatan tersebut **belum menjadi agenda yang dilaksanakan pada periode ini (bersifat time schedule)**.

4. Persentase Capaian Kinerja Sasaran II sebagai sasaran pendukung yaitu Nilai SAKIP yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 sebesar **94,40%** dengan predikat **BAIK** dengan Nilai AKIP yang diperoleh yaitu 70,80%* (BB).
5. Faktor yang menjadi penghambat pencapaian kinerja tahun 2026 terhadap beberapa target sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :
 1. Terdapat beberapa kegiatan yang sifatnya disediakan sehingga penggunaan anggarannya disesuaikan;
 2. Pengolahan data dan informasi pada lingkup bidang belum optimal;
6. Langkah Perbaikan Kinerja
 1. Memperbaiki metode pengumpulan dan validasi data capaian kinerja sehingga lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap indikator didukung dengan eviden yang jelas dan terdokumentasi.
 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara triwulanan dan semesteran untuk memastikan kesesuaian antara target dan realisas
 3. Melaksanakan rapat koordinasi staf pertriwulan lingkup Sekretariat DPRD untuk peningkatan akuntabilitas kinerja.
 4. Meningkatkan komitmen terhadap pencapaian target yang ditetapkan di setiap Bidang teknis pada lingkup Sekretariat DPRD.
7. Saran

Dalam mempertahankan dan memperbaiki keberhasilan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur, diharapkan :

 1. Diperlukan komitmen yang konsisten dari pimpinan dan seluruh pegawai dalam menerapkan prinsip-prinsip SAKIP, mulai dari perencanaan hingga pelaporan kinerja..
 2. Dukungan kerjasama dan kolaborasi dari seluruh ASN Sekretariat DPRD.
 3. Perlu terus dilakukan sinkronisasi antara SKP, Perjanjian Kinerja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran agar seluruh program dan kegiatan dapat selaras dan diukur mulai ka OPD ke Kabag, kabag ke kasubag, kasubag ke Staf.
 4. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Perbaikan-Perbaikan Tahun Lalu

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Kinerja pada Tahun 2025 di tuangkan dalam matriks tindak lanjut sebagai berikut :

**Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja
Sekretariat DPRD
Tahun 2025**

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tidak Lanjut	Penanggung Jawab	Status/progres penyelesaian
1.	Agar OPD dapat mencantumkan landasan hukum secara ringkas pada bagian pendahuluan, guna memberikan penguatan terhadap dasar legal penyelenggaraan tugas dan fungsi;	Telah mencantumkan landasan hukum secara ringkas pada bagian pendahuluan, guna memberikan penguatan terhadap dasar legal penyelenggaraan tugas dan fungsi;	Sekretariat DPRD	selesai
2	Agar OPD disarankan untuk mempertahankan kelengkapan penyajian data kinerja serta memperkuat analisis atas capaian indikator, termasuk identifikasi faktor keberhasilan maupun kendala, sebagai dasar perbaikan kinerja ke depan	Sekretariat DPRD akan mempertahankan kelengkapan penyajian data kinerja serta memperkuat analisis atas capaian indikator, termasuk identifikasi faktor keberhasilan maupun kendala, sebagai dasar perbaikan kinerja ke depan	Sekretariat DPRD	selesai
3	Agar OPD melakukan perbaikan dalam penyajian informasi kinerja dengan memastikan konsistensi antara target, realisasi, dan persentase capaian melalui perhitungan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Telah Melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kesesuaian antara target, realisasi, dan persentase capaian. Pastikan rumus perhitungan digunakan secara benar dan seragam (misalnya: capaian = realisasi ÷ target × 100%).	Sekretariat DPRD	selesai
4	agar OPD menjaga konsistensi berkelanjutan dalam mempertahankan keselarasan antara Renstra, Perjanjian Kinerja, dan LKj, serta peningkatan kualitas perumusan indikator kinerja agar lebih terukur, jelas, dan dapat digunakan secara efektif dalam pengukuran kinerja organisasi.;	Akan menjaga konsistensi penyelarasan berkelanjutan antara Renstra, Perjanjian Kinerja, dan LKj melalui penyusunan matriks cascading kinerja, standarisasi indikator berbasis prinsip SMART, serta penguatan mekanisme reuiu dan monitoring berkala. Selain itu, akan disusun kamus indikator dan SOP pengelolaan kinerja guna memastikan indikator yang digunakan terukur, jelas, dan konsisten sebagai dasar pengukuran kinerja organisasi."	Sekretariat DPRD	selesai

5	Diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga konsistensi kesesuaian target indikator kinerja antara Perjanjian Kinerja dan LKj, serta meningkatkan kualitas penetapan target agar lebih menantang, terukur, dan relevan dengan sasaran strategis organisasi.	Melakukan pencocokan (triwulan/semester) antara indikator, target, dan satuan pada Perjanjian Kinerja (PK) dengan yang disajikan di LKj agar tidak terjadi perbedaan.	Sekretariat DPRD	selesai
6	Agar OPD senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk menjaga konsistensi kesesuaian antara IKU pada LKj dengan Dokumen IKU yang telah ditetapkan;	OPD akan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rekonsiliasi IKU antara LKj dan Dokumen IKU, didukung dengan penyusunan matriks kesesuaian, penerapan P pengelolaan IKU, serta verifikasi berjenjang. Langkah ini dilakukan untuk memastikan konsistensi, keakuratan, dan keterlacakan indikator kinerja sebagai dasar pengukuran kinerja organisasi.”	Sekretariat DPRD	selesai
7	Disarankan agar unit kerja melengkapi LKj dengan analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran, waktu, dan SDM) pada bagian Perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, Standard Nasional dan Renstra, yang dikaitkan dengan capaian indikator, sehingga informasi kinerja menjadi lebih komprehensif dan dapat mendukung pengambilan keputusan	Telah melengkapi LKj dengan analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang mencakup anggaran, waktu, dan SDM pada setiap indikator kinerja. Analisis dilakukan melalui perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya, target Renstra, dan standar yang relevan, serta disajikan dalam bentuk rasio efisiensi dan narasi analitis. Hasil analisis ini akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan perbaikan perencanaan kinerja ke depan.”	Sekretariat DPRD	selesai
8	Disarankan agar OPD menyajikan informasi yang lebih komprehensif terkait efisiensi penggunaan sumber daya baik itu sumber daya Manusia, Sumber daya keuangan maupun waktu pada indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah;	Telah menyajikan informasi yang lebih komprehensif terkait efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian Nilai AKIP Perangkat Daerah, meliputi aspek anggaran, SDM, dan waktu. Analisis dilakukan melalui pendekatan input-output, perbandingan antar tahun, serta penyajian rasio efisiensi yang didukung dengan narasi analitis, sehingga memberikan gambaran yang utuh dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja.”	Sekretariat DPRD	selesai
9	Disarankan agar OPD menyajikan analisis data terkait hasil Evaluasi AKIP periode /tahun sebelumnya;	Telah menyajikan analisis data hasil Evaluasi AKIP tahun sebelumnya secara komprehensif, melalui perbandingan nilai dan komponen penilaian antar tahun, identifikasi faktor penyebab perubahan, serta keterkaitannya dengan tindak lanjut rekomendasi yang telah dilaksanakan. Analisis ini digunakan sebagai dasar dalam perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah.”	Sekretariat DPRD	selesai

10	agar OPD dalam penyajian IKU menjadi lebih berkualitas, terukur, dan mampu menggambarkan kinerja organisasi secara akuntabel serta mendukung pengambilan keputusan berbasis kinerja.	melakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui penerapan prinsip SMART dan orientasi pada outcome, penyusunan kamus indikator, serta penguatan kualitas data dan metode pengukuran. Selain itu, akan dilakukan penyesuaian antar dokumen kinerja dan penyajian IKU yang dilengkapi dengan analisis capaian dan efisiensi, sehingga indikator yang digunakan lebih terukur, akuntabel, dan mampu mendukung pengambilan keputusan berbasis kinerja.”	Sekretariat DPRD	selesai
----	--	---	------------------	---------

Malili, 14 April 2026

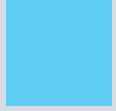
Sekretaris DPRD,

ALAMSYAH PERKESI, M.Si

Pangkat : Pembina TK I

NIP.197201142006041005





LAMPIRAN









